

Panduan Pendidikan Politik untuk Perempuan

Panduan Pendidikan Politik untuk Perempuan

PANDUAN PENDIDIKAN POLITIK UNTUK PEREMPUAN

Penyusun Buku:

1. Shadia Marhaban
2. Affan Ramli
3. Sri Rahmayanti Tiba
4. F. Wendevid Rakam

Editor:

1. Shadia Marhaban
2. Saleh Abdullah
3. Makmur Keliat
4. F. Wendevid Rakam
5. Puthut EA.

Diterbitkan oleh

PT. GEUNTAMEDIA MEUGAH ASIA

JL. T. Nyak Arief No.328, Darussalam, Banda Aceh

INSISTPress

Jln. Ganesha II no. 9,

Muja-Muju, Yogyakarta 55165

Telp./faks. 0274-556433

Backcover: Diterbitkan oleh Liga Inong Aceh (LINA) atas dukungan Friedrich Ebert Stiftung (FES)
Disertai cover masing-masing.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

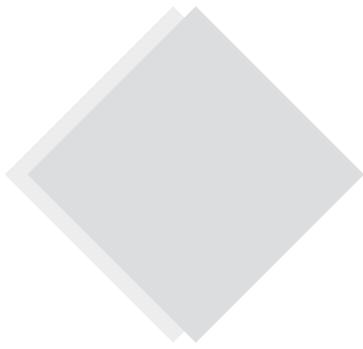
PANDUAN PENDIDIKAN POLITIK UNTUK PEREMPUAN

Cetakan Pertama, Maret 2009

60 halaman, 21 x 29.7 cm

ISBN 979-98499-8-?

Isi di luar tanggung jawab percetakan



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat *Allah Subhanahu wataala* dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan modul sederhana ini telah dapat diselesaikan. Buku ini, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Perempuan*, merupakan produk dari kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah dilakukan oleh LINA (Liga Inong Aceh) sejak lembaga ini didirikan pada tahun 2006. Sebagai suatu refleksi terhadap seluruh kegiatan itu, buku ini dapat juga disebut sebagai suatu ungkapan kepedulian LINA terhadap persoalan perempuan di Aceh. Adalah benar masa tiga tahun sejak LINA didirikan barangkali merupakan kurun waktu yang terlalu ringkas untuk menyatakan kepedulian itu telah selesai. Buku ini sesungguhnya justru dimaksudkan untuk dapat terus memberikan inspirasi bagi semua pihak betapa pentingnya untuk tetap melakukan penguatan gerakan perempuan di Aceh.

Penguatan yang diharapkan sebenarnya tidak muluk. Penguatan yang diharapkan oleh LINA sebenarnya adalah penguatan perempuan pada tataran akar rumput (*grass root*). LINA tidak berkeinginan untuk terserap dalam arus-arus diskusi besar tentang politik di negeri ini, seperti seberapa besar kuota atau persentase perempuan di parlemen. Isu itu bukan menjadi isu politik yang menarik bagi LINA. Bagi LINA, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik seharusnya tidak hanya dipahami dalam konteks makro-nasional seperti itu. Yang jauh lebih penting bagi LINA adalah penguatan pembuatan keputusan pada tingkat mikro, seperti pada tataran keluarga dan tingkat hunian desa. Bagi LINA, partisipasi politik bagi perempuan tidak hanya melalui pelibatan kegiatan partai politik dan parlemen tetapi melalui gerakan-gerakan nyata di tataran lokal walaupun itu sangat mikro sifatnya.

Proses perdamaian di Aceh hingga kini masih terus berlangsung sejak MoU Helsinki, 15 Agustus 2005. Buku ini juga diharapkan dapat memperkuat proses perdamaian itu. Perempuan, bagi LINA, haruslah juga menjadi pemetik manfaat dari proses perdamaian yang tengah berlangsung. Perempuan diperhatikan tidak hanya ketika ia menjadi korban dalam konflik tetapi juga harus terus diperhatikan ketika cakrawala perdamaian itu tengah muncul ke permukaan. Karena itu pula, LINA sangat berharap di masa depan perempuan di Aceh harus dapat mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan baik di tingkat gampong maupun di tingkat yang lebih besar. Ringkasnya, dalam masa perdamaian, perempuan harus menjadi pelaku pembangunan dan perubahan.

Buku manual ini dibuat untuk kegiatan yang sangat praktis, menjadi panduan bagi para fasilitator untuk kerja-kerja penguatan perempuan di Aceh. Buku panduan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada para perempuan Aceh, khususnya dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam perdamaian yang berkelanjutan dan membuahkan kesejahteraan.

Buku ini disusun dalam 3 bab, pertama penjabaran atas prinsip dasar metodologi. Bab kedua memuat proses-proses fasilitasi. Sementara bab ketiga, mencantumkan proses pengecekan dan evaluasi, sebagai tolok ukur apakah pelatihan yang dilakukan cukup berhasil atau tidak.

Banyak pihak yang telah terlibat dalam menghasilkan modul ini. Terima kasih pertama kami sampaikan pada Friedrich Ebert Stiftung (FES) yang telah bersedia membantu LINA dalam menghasilkan buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saleh Abdullah dari INSIST, Makmur Keliat dari Universitas Indonesia, Purwadi dari Universitas Parahyangan, yang telah bersama kami dalam suka maupun duka selama di Aceh. Tidak lupa juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman LINA yang telah ikut memberi kontribusi pemikiran dan ide kreatif untuk penyempurnaan modul ini.

Kami menyadari bahwa modul ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami berharap menerima kritikan yang membangun dari para penggunanya demi penyempurnaan modul ini ke depan.

Salam perdamaian dan demokrasi.

Wassalam
Shadia Marhaban
(Presiden LINA)



Ucapan Terima Kasih

Dengan terselesaikannya modul pelatihan partisipasi perempuan dalam politik ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah membantu dalam pembuatan modul ini. Secara khusus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Shadia Marhaban, Presiden Liga Iong Aceh
2. Rina Julvinati, FES
3. Affan Ramli, Prodelat
4. Ruslan Razali, IIUM Malaysia
5. F. Wendevid Rakam, LINA
6. Cut Nurliana, LINA
7. Muktharamil Saudi, LINA
8. Sri Rahmayanti, LINA
9. Fitriani Harun, LINA Aceh Timur
10. Salawati, LINA Aceh Utara
11. Lizarwati, LINA Bireuen
12. Ernidawaty. SH, LINA Pidie
13. Seluruh staff LINA yang telah mendukung terbitnya modul pelatihan ini

Kami sadari bahwa masih banyak pihak lain yang telah membantu kami dalam penyelenggaraan penyusunan modul ini. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Salam perdamaian dan demokrasi,

Wassalam,
Tim Penyusun

Prinsip Dasar Metodologi

Modul Pendidikan politik ini merupakan bagian dari aktivitas Liga Inong Aceh (LINA) untuk mewujudkan visi dan misinya dalam meningkatkan kapasitas politik bagi perempuan di Aceh. Pembuatan modul ini telah melalui beberapa tahap uji coba di lapangan, dalam bentuk training dan workshop yang diselenggarakan oleh LINA. Sebagai pedoman bagi para pengguna modul, agar dapat memahami dan menggunakannya dengan baik, perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alasan pembuatan modul.

Alasan utama dibuatnya Modul ini adalah:

- Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, demi terjaminnya prinsip keterwakilan dalam sebuah sistem yang demokratis.
- Perempuan yang selama ini masih termajinalkan kehadirannya perlu menunjukkan eksistensinya dalam dunia politik untuk menyuarakan segala aspirasinya.

2. Tema Utama.

Modul ini berporos pada tema utama peningkatan kapasitas politik bagi perempuan dari Liga Inong Aceh, yaitu “ **Partisipasi Perempuan dalam Politik**”.

Tema utama tersebut memberi isyarat tentang adanya beberapa hal pokok yang menjadi konsentrasi dari modul ini, yaitu:

- Perempuan sebagai bagian dari warga negara memiliki hak yang sama dalam wilayah politik.
- Keikutsertaan perempuan dalam politik sangat penting karena perempuan juga perlu ikut dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kemajuan dari perempuan itu sendiri.

3. Aspek metodologis.

Untuk membantu fasilitator mengembangkan pelatihan secara efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, pada prinsipnya seluruh modul ini merupakan kesatuan utuh yang sinergis. Artinya, setiap tahap atau materi, harus dilihat sebagai bagian yang terkait dengan tahap atau materi selanjutnya. Karena itu seluruh metode/ media yang digunakan dalam setiap sub modul harus diperhitungkan dalam kerangka keseluruhan proses. Ritme atau prosesnya akan mengikuti tahapan yang mengalir dan membentuk proses yang meliputi tahap penyesuaian (*unfreezing*), mencapai puncak (*moving*), kemudian ada tahapan pengendapan (*refreezing*).

Kedua, dari segi proses dan metode yang digunakan, modul ini mendasari prinsipnya pada prinsip partisipatif dan pendidikan orang dewasa. Dalam prinsip pendidikan orang dewasa, peserta didik diperlakukan dewasa, dalam arti, peserta didik tidak dicekoki atau diperlakukan seperti gelas kosong yang harus diisi air dari atas. Pendekatan pendidikan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, yang dipermukaan akan nampak seperti proses belajar bersama, mengembangkan bersama, dan memahami bersama.

Daur proses pendidikan ini, dengan demikian, akan merupakan daur melakukan bersama-memikirkan bersama-memeriksa bersama-dan kembali lagi melakukan bersama. Proses ini dikenal sebagai “daur praksis” yang terdiri dari “aksi-refleksi-aksi.” Daur pendidikan inilah, yang oleh pencetusnya Paulo Freire, disebut sebagai “Pendidikan yang Membebaskan.” Hal ini juga didasari oleh falsafah etimologi kata “education” yang dalam bahasa Indonesia adalah pendidikan. “Education” dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa latin “educere” yang terdiri dari “exit” yang berarti “keluar”, dan “ducere” yang berarti “membawa”. Dengan demikian “educere” berarti membawa keluar, keluar dari kebodohan, atau “membebaskan”.

Ketiga, risiko yang sangat mungkin terjadi, dan pada dasarnya memang diharapkan terjadi, adalah modul ini akan diperlakukan secara tidak kaku. Hal ini didasari oleh satu keyakinan bahwa konteks sosial dan dinamika sebuah masyarakat, mempunyai ciri-cirinya sendiri yang khas. Bahkan bahasa dan kode-kode komunikasi di antara masyarakat bisa beragam. Juga bentuk dan isi setiap persoalan masyarakat yang dihadapi pasti berbeda.

Menyadari hal-hal tersebut sebagai fakta sosial, maka fasilitator sangat diharapkan bisa mengembangkan metode dan proses yang sangat kreatif dari modul ini, dan tidak melihatnya secara kaku. Pandangan yang kaku dan hanya terpaku pada modul (*textbook thinking*) akan membuat proses pendidikan menjadi lambat, monoton, membosankan, tidak kontekstual, dan akhirnya tidak efektif. Karena sebuah proses pendidikan yang membebaskan, harus dimulai dengan membongkar persoalan yang memang dihadapi oleh peserta didik sendiri. Sehingga proses pendidikan secara keseluruhan juga bisa menjadi sarana untuk mengembangkan kesadaran kritis peserta didik.

Karenanya, di dalam dunia pendidikan orang dewasa, dikenal slogan; “pahamilah lalu lupakan”. Maksudnya, pahami, hayati, endapkan, lalu lakukan (kontekstualisasikan) dengan tidak perlu lagi terikat pada teks.

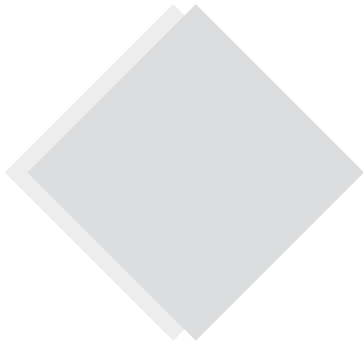
Keempat, secara metodologis, hal sangat penting untuk diperhatikan adalah peran serta aktif peserta didik. Karena itu, idealnya, proses belajar harus mengedepankan kelompok dinamis. Di mana peserta didik secara aktif mengutarakan pikiran dan pendapat, baik secara verbal, maupun lewat tindakan. Dan fasilitator hanya berperan sebagai orang yang membantu mempermudah proses, dan bukan orang yang menentukan arah seluruh proses secara sepihak. Karena itu, di dalam dunia pendidikan orang dewasa dikenal peringatan dini sebagai berikut: “Bila seorang fasilitator beranggapan peserta didik tidak bisa memecahkan masalahnya, jangan-jangan sumber masalahnya berada di fasilitator itu sendiri.”

4. Kepada siapa dan pada waktu kapan modul digunakan?

Sebagai pegangan pelatihan, modul ini pertama-tama dialamatkan kepada para pelatih dan fasilitator pelatihan/pendidikan yang memberikan perhatian kepada berbagai aktivitas pelatihan dan pendidikan politik, terutama yang berkonsentrasi pada pendidikan untuk penguatan politik perempuan. Namun demikian, pola penyusunannya dalam bentuk sekarang ini dimaksudkan juga sebagai sumber informasi dan referensi bagi para pengguna (pelatih, fasilitator, pendidik, dll) di dalam mengembangkan model acuan bagi pelatihan/pendidikan resolusi konflik berbasis komunitas lokal.

Dengan begitu, waktu penggunaan modul tidaklah dibatasi hanya berkaitan dengan berbagai kesempatan dan kebutuhan para penggunaan untuk pendidikan politik perempuan saja, melainkan juga untuk membantu memfasilitasi soal resolusi konflik.

Selamat berproses. Yakinlah anda pasti bisa!



Daftar Isi

Kata Pengantar — 5

Ucapan Terimakasih — 7

Prinsip Dasar Metodologi — 9

Daftar isi — 11

Proses Pembukaan dan Perkenalan — 13

- a. Pengenalan Diri — 14
- b. Penciptaan Suasana dan Kontrak Belajar — 16

Proses Fasilitasi — 17

- a. Pengaruh MoU Helsinki terhadap Profil Pemerintahan Aceh — 18
- b. Menimbang Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Aceh — 22
- c. Demokrasi, HAM & Parpol — 26
- d. Gerakan Sosial — 30
- e. Budaya Kesadaran Kritis — 38
- f. Kepemimpinan Perempuan — 43

Evaluasi — 49

Lampiran-Lampiran — 54

Referensi Bacaan — 58

Proses Pembukaan dan Perkenalan

Sessi I

Judul	PENGENALAN DIRI
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat sesama peserta, fasilitator dan panitia saling mengenal. 2. Mencairkan suasana untuk membangun keakraban. 3. Menjadi media orientasi untuk mengetahui seberapa dalam peserta mengenali persoalan/kondisi politik di daerahnya.
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat saling mengenal satu sama lain. 2. Peserta dapat mengidentifikasi kapasitas dan kekurangan dirinya. 3. Peserta dapat menentukan alternatif pilihan terbaik mengatasi kekurangan atau mengembangkan kapasitas diri yang bermanfaat dalam menghadapi kondisi lingkungan sosial maupun kondisi politik di daerahnya.
Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perkenalan diri ➤ Gambaran kondisi peran perempuan dalam lingkungan sosial maupun politik di daerahnya masing-masing.
Metode	<ol style="list-style-type: none"> a. perkenalan b. Refleksi atas pengalaman yang telah ada
Media pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Permainan ➤ Diskusi
Langkah kerja dan pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fasilitator menjelaskan tentang arti penting perkenalan dan orientasi awal. Tekankan arti penting kehangatan dan kebersamaan. Tekankan juga bahwa pengalaman masing-masing orang pasti berbeda, dan justru kita akan menganggap penting belajar dari pengalaman yang berbeda-beda itu. ✓ Bagikan kertas metaplan, 1 lembar 1 orang, dan minta kepada mereka untuk menulis nama mereka masing, daerah asal, dan 1 pengalaman kerja paling mengesankan terkait dengan permasalahan sosial dan politik. Tidak perlu menulis panjang-panjang. Cukup pendek dan ringkas saja, poinnya saja. ✓ Minta kepada masing-masing orang untuk mencari pasangan 1 orang: si A mencari pasangan si B, misalnya. Lalu minta masing-masing pasangan itu untuk saling berkenalan dan bercerita tentang apa yang mereka tulis di kertas tadi. Beri waktu sekitar 3-5 menit saja untuk proses ini.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lalu minta setiap orang memperkenalkan pasangannya secara bergantian (si A memperkenalkan si B dan sebaliknya). Tidak hanya memperkenalkan nama, tapi juga daerah asal, dan satu pengalaman kerja tadi. ✓ Fasilitator mencatat pengalaman-pengalaman kerja tadi di papan, dan nantinya diperas pada pengalaman-pengalaman yang ada kaitannya dengan topik training ini. Cukup beberapa pengalaman yang relevan saja, tidak perlu semua. ✓ Setelah semua memperkenalkan pasangannya, fasilitator kemudian mengembangkan diskusi tentang poin-poin (pengalaman-pengalaman) yang relevan tadi. Bisa saja caranya dengan meminta peserta untuk berkomentar.
Bahan dan peralatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Flip chart b. Kertas plano
Waktu	⌚ 60 menit efektif



Sessi II

Judul	PENCIPTAAN SUASANA DAN KONTRAK BELAJAR
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan suasana psikologis kondusif (terbuka, bersahabat, dan menyenangkan) bagi setiap peserta untuk belajar bersama. 2. Menunjukkan kepada peserta bahwa berbagai kekayaan diantara mereka dapat dikelola bersama mencapai tujuan belajar bersama.
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta terampil mengelola perbedaan interest untuk menciptakan suasana dan mencapai tujuan belajar bersama. 2. Peserta dapat memahami agenda, alur dan proses belajar. 3. Peserta dapat menghasilkan beberapa kesepakatan bersama untuk menunjang kelancaran dan kenyamanan proses pelatihan.
Pokok Bahasan	Adanya kesepakatan bersama dalam proses pelatihan
Metode	<ol style="list-style-type: none"> a. Curah pendapat, diskusi tanya jawab b. Refleksi atas pengalaman yang telah ada
Media pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alur pelatihan secara umum dan khusus ➤ Kesepakatan bersama
Langkah kerja dan pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fasilitator menjelaskan tentang proses pelatihan secara umum dan materi yang akan diberikan pada saat proses pelatihan berlangsung. ✓ Fasilitator membuat semacam skedul acara tentatif, dan mendiskusikannya dengan peserta. Minta persetujuan mereka, dan minta juga kalau ada yang ingin menambahkan. ✓ Setelah itu, ajak peserta membuat beberapa kesepakatan yang menyangkut proses hari ke hari. Seperti kesepakatan tentang waktu, dering HP, merokok dsb. ✓ Setelah dua hal di atas, fasilitator meminta peserta membuat daftar harapan peserta dari training ini: Apa yang mereka dapatkan atau pelajari dari training ini.
Bahan dan peralatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Jadwal acara b. Flip chart c. Kertas plano
Waktu	🕒 45 menit efektif

Proses Fasilitasi

Sessi III

Judul	Pengaruh MoU Helsinki terhadap Profil Pemerintahan Aceh
Tujuan	Mengetahui serta memahami secara mendalam tentang MoU Helsinki dan pengaruhnya terhadap pemerintahan Aceh.
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui latar belakang lahirnya dan tujuan MoU Helsinki. 2. Peserta memahami kondisi politik Aceh pasca MoU Helsinki. 3. Peserta mengetahui perbedaan politik dan pemerintahan sebelum dan sesudah MoU Helsinki terutama dalam hal <i>self government</i>. 4. Peserta memahami agenda-agenda MoU Helsinki yang berhasil dan yang belum berhasil. 5. Peserta memahami keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan sebelum dan sesudah MoU Helsinki. 6. Peserta memahami kehadiran partai lokal Aceh pasca MoU Helsinki
Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Butir-butir isi MoU Helsinki yang dianggap penting untuk dibahas. ➤ Dampak MoU Helsinki bagi masa depan Aceh ➤ Masa Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Reintegrasi pasca-konflik dan tsunami.
Metode	<ol style="list-style-type: none"> a. Curah pendapat. b. Diskusi dan penajaman tema. c. Diskusi kelompok.
Media pembelajaran	Studi kasus
Langkah kerja dan pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanyakan kepada peserta, apa yang ada di pikiran mereka begitu disebut: MoU Helsinki. 2. Menulis semua hasil pikiran peserta di papan tulis. 3. Mengklasifikasi hasil jawaban peserta, terutama untuk jawaban yang setipe dan hampir sama, misalnya: latar-belakang, proses, kekurangan dan kelebihan. 4. Mengkritisi hasil klasifikasi. 5. Menanyakan kepada peserta siapa saja yang belum pernah membaca buku tentang MoU Helsinki. 6. Menanyakan kepada peserta yang sudah membaca buku tersebut tentang isi dari MoU Helsinki. 7. Membagikan buku MoU Helsinki.

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Meminta peserta untuk membacanya, dan menulis poin-poin penting isi MoU Helsinki. 9. Selanjutnya melengkapi bersama-sama klasifikasi yang sebelumnya dibuat oleh peserta (sebelum mereka membaca isi MoU Helsinki) dengan poin-poin yang mereka dapatkan setelah membaca. 10. Mengajak peserta untuk mendiskusikan kandungan MoU Helsinki berdasarkan poin-poin yang telah mereka buat dan lengkapi, lalu menyempurnakannya. 11. Tahap selanjutnya adalah mengkritisi agenda MoU Helsinki dengan analisa SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman), dengan cara membagi peserta menjadi 4 kelompok. 12. Jelaskan terlebih dahulu apa itu SWOT. Lalu masing-masing kelompok mendapatkan jatah untuk mendiskusikan soal agenda-agenda MoU Helsinki, menganalisisnya dengan jatah masing-masing. Misalnya, kelompok 1: kekuatan, kelompok 2: kelemahan, kelompok 3: peluang, kelompok 4: ancaman. 13. Beri waktu yang cukup kepada peserta untuk melakukan diskusi kelompok. 14. Aktif berkeliling di 4 kelompok, untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap belum jelas. 15. Peserta diminta untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompok. 16. Memandu peserta untuk mengkritisi dan melengkapi hasil presentasi masing-masing kelompok, terutama dengan tiga tema kunci: self-government, partisipasi perempuan dalam bidang politik terutama dalam konteks HAM, dan soal partai lokal. 17. Buatlah poin-poin kesimpulan. 18. Meminta kepada peserta untuk memberi umpan balik dalam rangka mematangkan hasil-hasil kesimpulan tersebut.
Bahan dan peralatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Buku saku MoU Helsinki b. Kertas metaplan
Waktu	⌚ 90 menit efektif



Lembar pembelajaran

Pengaruh MoU Helsinki terhadap Profil Pemerintahan Aceh

Tanggal 15 Agustus 2005 merupakan awal kebangkitan sejarah baru bagi Aceh. Pada tanggal tersebut Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia sama-sama sepakat guna mengakhiri dentuman senjata dan konflik yang terjadi di Aceh. Sebuah nota yang biasa disebut dengan MoU Helsinki diteken oleh kedua belah pihak, dan nota tersebut memuat beberapa poin sebagai titik temu antara keinginan untuk merdeka dan tawaran otonomi.

Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya penandatanganan MoU tersebut, antara lain adanya beberapa kegagalan gencatan senjata (Jeda kemanusiaan, Coha, Peace Zone dll) sehingga penderitaan rakyat dalam suasana konflik terus bertambah. Di tengah suasana yang sangat mencekam, musibah terhebat terjadi di Aceh yang menelan banyak korban. Tsunami pada tanggal 24 Desember 2004 juga menjadi salah satu faktor yang menarik perhatian negara-negara Internasional untuk mendorong terwujudnya perdamaian di Aceh. Selain tentu saja mereka membantu dalam tahap tanggap-darurat, serta tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Sungguh suatu rahmat yang diberikan Allah SWT untuk menciptakan iktikad baik pemerintah Jakarta (SBY-JK) dan Pihak Gerakan Aceh Merdeka untuk duduk kembali dan membahas tentang proses perdamaian yang akan diwujudkan di Aceh.

Akhirnya di bulan Agustus 2005 presiden Finlandia (Mr Marti Ahtisaari) menjadi mediator di sebuah kota yang bernama Helsinki mempertemukan perwakilan GAM dan Pemerintah Indonesia untuk membahas persoalan-persoalan di Aceh. Awalnya, kedua belah pihak sama-sama berkeras untuk mempertahankan keinginan mereka yaitu Merdeka dan Otonomi. Namun kemudian kedua belah pihak menyepakati konsep self government untuk Aceh.

Berikut ada 6 poin besar yang terdapat dalam Nota Kesepahaman (MoU Helsinki) yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh (Self Government) : UU-PA
2. Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Amnesti dan Reintegrasi
4. Pengaturan keamanan
5. AMM
6. Penyelesaian perselisihan

Dari keenam poin tersebut di atas, banyak kemunduran dan kemajuan yang berkaitan dengan implementasinya, terutama dari MoU ke UU-PA. Sehingga UU-PA sebagai turunan dari MoU, ada yang tidak sesuai dengan apa yang dimandatkan MoU. Banyak kelompok masyarakat sipil yang meminta penyesuaian tersebut sehingga UU-PA sebagai turunannya MoU harus memiliki kesamaan. Selain itu juga ada hal-hal yang telah dimandatkan dalam MoU namun belum terlaksana, antara lain: terwujudnya pengadilan HAM dan KKR, pemberian amnesti yang belum selesai dan poin reintegrasi yang masih carut-marut.

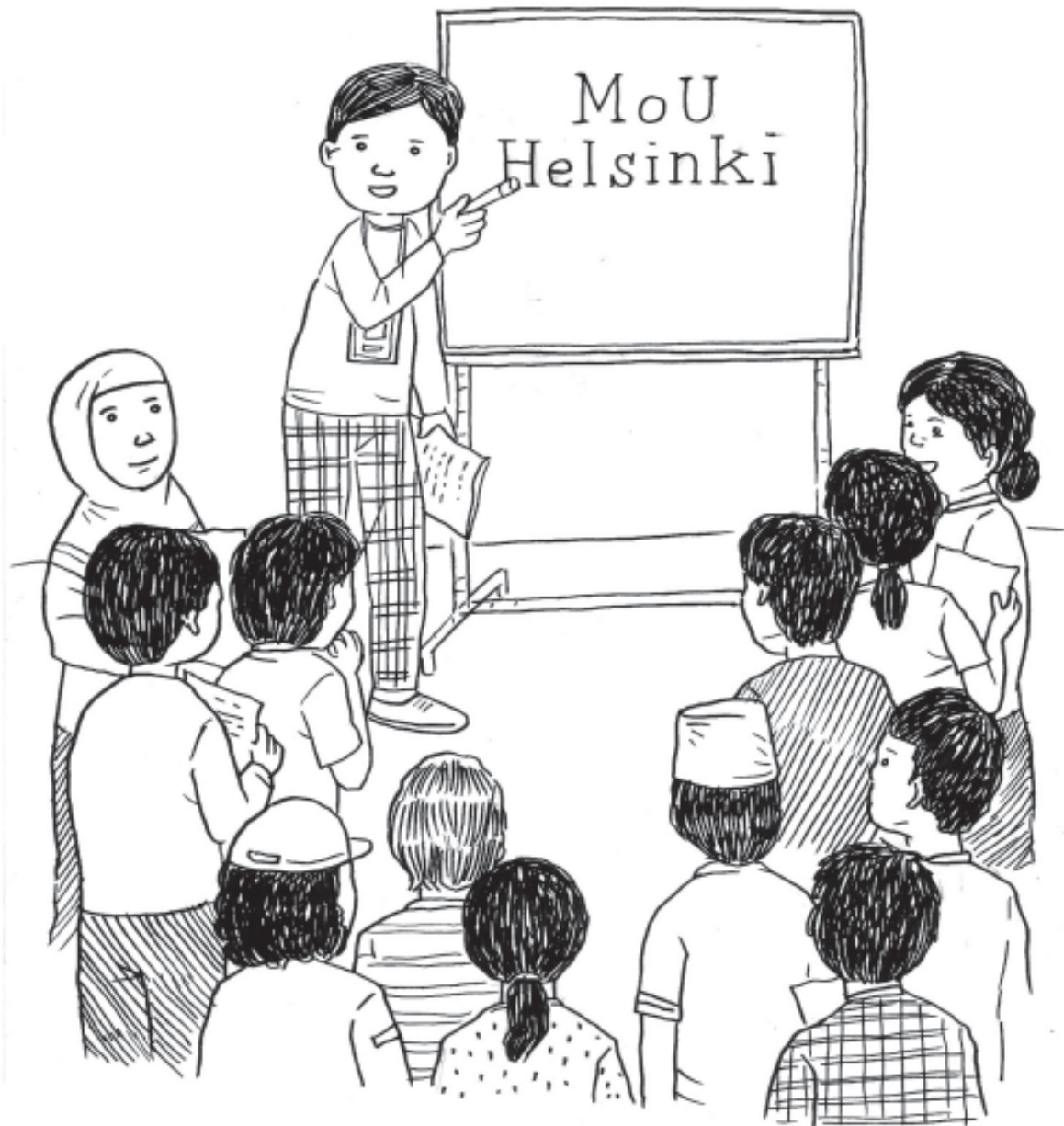
Adapun beberapa hal di dalam UU-PA yang dinilai tidak sesuai dengan MoU, antara lain :

1. Poin 17 BAB I Pasal satu yang berisi tentang: lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. (poin 1.1.7)
2. Pasal 3 BAB II, batas-batas daerah Aceh (poin 1.1.4)
3. Kewenangan (pembagian peran yang tidak jelas dalam UU-PA). Dalam MoU poin ekonomi, 1.1.3, 1.1.5.

4. Pasal 228 BAB 34 tentang pembentukan Pengadilan HAM yang tidak berlaku surut.
5. Pasal 246 BAB 36 tentang tidak dibenarkan menggunakan lambang lain selain lambang negara

MoU juga berpengaruh pada sistem pemerintahan Aceh saat ini. Proses pemerintahan dan perpolitikan Aceh berubah menjadi Aceh yang demokratis dengan mencoba menggali beberapa peluang untuk kearifan lokal. Profil pemerintahan Aceh hari ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan yang belum pernah terjadi di Indonesia. Misalnya pemilihan eksekutif yang berlangsung dengan calon independen. Kemudian partai politik lokal yang khusus terdapat di Aceh. Sejarah Aceh juga akan tercatat bagaimana adanya perubahan yang terjadi pada pemerintahan. Diakui atau tidak kepala pemerintahan Aceh saat ini merupakan orang yang berasal dari Gerakan perlawanan Rakyat terhadap pemerintahan. Ini adalah bukti nyata bahwa profil pemerintahan Aceh yang sangat berubah dari pemerintahan sebelumnya.

Pemilihan anggota legeslatif juga terlihat berbeda dengan daerah lain. Aceh akan memakai konsep self Government (pemerintahan sendiri). Dan jika ini juga akan diterapkan sesuai dengan konsep yang sesuai dengan MoU Helsinki, maka ini juga akan menjadi profil pemerintahan Aceh yang baru.



Sessi IV

Judul	Menimbang Kearifan Lokal dalam Sistem Politik Aceh
Tujuan	Memahami secara mendalam butir-butir kearifan lokal Aceh, yang bisa memberikan kontribusi penting bagi sistem politik di Aceh.
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat memahami dan menjelaskan definisi tentang kearifan lokal. 2. Peserta mampu memahami dan menjelaskan tentang falsafah dan budaya bangsa Aceh, dan jabarannya di dalam struktur dan sistem politik di Aceh. 3. Peserta mampu memahami pentingnya merevitalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal di dalam sistem politik. 4. Peserta memahami kontribusi perempuan Aceh di dalam sistem politik dan kemasyarakatan. 5. Peserta memahami pentingnya keterlibatan perempuan dalam sejarah politik Aceh dalam sistem politik sekarang.
Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemahaman soal budaya ➤ Definisi Kearifan Lokal ➤ Falsafah Bangsa Aceh (Misalnya: Adat Bak Poe) ➤ Struktur Politik Aceh ➤ Struktur Pendidikan Aceh ➤ Perbandingan sistem Pemerintah Aceh masa lalu dan masa sekarang
Metode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curah pendapat 2. Diskusi kelompok
Media pembelajaran	Studi Sejarah dan kebudayaan
Langkah kerja dan pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanyakan kepada peserta, apa yang terlintas di kepala mereka begitu mendengar kata 'kebudayaan'. 2. Tulislah semua curahan pendapat peserta di papan tulis, lalu kelompokkanlah. Misalnya: tradisi, nilai-nilai, kegunaan, dll. 3. Ajaklah peserta untuk mengkritisi kelompok-kelompok kata-kata tersebut, lalu ajaklah membuat kesimpulan yang kritis. Misalnya: budaya selalu berubah dan terbuka. Kemudian ajaklah untuk merefleksikan bersama persoalan kebudayaan. Misalnya saja: sesuai dengan konteks, terdapat nilai-nilai dan pelajaran bersama, dan digunakan untuk menyelesaikan persoalan bersama. 4. Tariklah ke persoalan tentang kearifan lokal. Bahwa nilai-nilai itu berasal dari pergulatan panjang sebuah masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup bersama. Tidak semua yang tradisi itu jelek dan juga tidak berarti semua itu baik.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Temukanlah bersama para peserta, bahwa kaum perempuan pun mempunyai partisipasi dan kontribusi yang penting dalam berbagai hal, seperti budaya, pemerintahan, dll. 6. Bagilah peserta menjadi 4 kelompok untuk membahas tentang <i>Adat Bak Poeteumeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak laksamana, Panglima dan Bentara.</i> 7. Mintalah peserta untuk melihat dengan kritis materi-materi tersebut dengan cara pandang kritis, seperti yang didapat dari poin-poin sebelumnya. 8. Berilah waktu yang cukup buat masing-masing kelompok untuk melakukan diskusi. 9. Mintalah masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi. 10. Ajaklah semua peserta untuk mengkritisi hasil presentasi masing-masing kelompok. 11. Buatlah poin-poin kesimpulan, dan ajaklah para peserta untuk menyempurnakan poin-poin tersebut.
Bahan dan peralatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi tentang hukum adat, falsafah serta budaya Aceh 2. Kertas metaplan
Waktu	➡ 90 menit efektif



Lembar pembelajaran.

Kearifan Lokal

Kearifan Lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat dalam suatu wilayah Negara. Ibarat sebuah pepatah lama yang selalu diucapkan: “*lain lubuk, lain ikannya*” dan “*Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung*”. Kedua Pepatah tersebut mengibaratkan bahwa setiap tempat memiliki kearifan lokal masing-masing. Kemudian kita juga harus menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang berada di tempat tersebut.

Suatu tradisi yang sudah mengadat atau kebiasaan di tengah masyarakat tidak akan pernah hilang kecuali terlupakan. Tradisi yang biasa disebut dengan adat istiadat memiliki cakupan yang sangat luas. Cakupan tersebut meliputi bidang ekonomi, pertanian, kehutanan, sistem pemerintahan dan politik dan lain sebagainya. Dalam konteks Aceh banyak kearifan lokal yang dapat kita jumpai misalnya dalam bidang pertanian, suatu tradisi yang hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat adalah adanya kenduri blang (syukuran untuk memulai menanam padi), kenduri laot (syukuran yang diadakan di laut) dan lain sebagainya.

Dalam struktur pemerintahan dan perpolitikan, Aceh memiliki keunikan (kearifan lokal) sendiri. Misalnya saja Aceh memiliki *Meuneumat* (falsafah bangsa). Falsafah bangsa Aceh adalah:

*“Adat Bak Poe Teumeureuhom
Hukom Bak Syiah Kuala
Qanun Bak Putroe Phang
Reusam Bak Laksamana, Panglima & Bentara”*

(*Adat*: Cara hidup berbangsa dan bernegara menurut hukum yang tak tertulis dalam nash syara', *Poe teumeureuhom*: Seseorang yang mendapatkan gelar khusus atau istimewa di Aceh. *Poe teumeureuhom* merupakan gelar bagi sultan atau raja). *Adat bak poe teumeureuhom* berarti bahwa suatu hukum atau peraturan/ undang-undang diatur oleh seorang sultan, dimana Kewenangan seorang sultan meliputi bidang politik, pemerintahan dan ekonomi.

(*Hukum*: Cara hidup berbangsa dan bernegara menurut hukum yang tertulis dalam nash syara'. *Syiah kuala* merupakan seorang ulama besar yang berasal dari Aceh Selatan, dengan nama lengkapnya adalah Syech Abdurrauf Al-Singkili). Mengapa hal-hal yang terdapat dalam hukum-hukum yang tertulis dalam nash syara' harus dipegang oleh seorang ulama? Di Aceh keunikan tersebut menandakan bahwa peran seorang ulama sangat besar untuk mengatur hubungan atau hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Nama Syech Syiah kuala kemudian dijadikan sebagai nama sebuah universitas besar di Aceh untuk mengenang jasa-jasa beliau dalam menafsirkan hukum-hukum syara' pada masa kerajaan Aceh.

(*Qanun* berarti peraturan tambahan. *Putroe Phang* merupakan seorang permaisuri raja yang berasal dari negeri Pahang Malaysia). Mengapa peraturan tambahan tersebut berada ditangan seorang putri (perempuan), hal tersebut disebabkan karena pada saat tersebut banyak kejadian-kejadian yang kemudian diperjuangkan oleh Putri Phang menjadi suatu peraturan negara. Sebagai contoh suatu kejadian yang terjadi di wilayah Pidie, pada saat itu ada seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya kemudian dia menjadi terlunta-lunta tidak mempunyai tempat berteduh. Kejadian tersebut diketahui oleh Putri Phang, kemudian ia membuat suatu peraturan bahwa setiap perempuan yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut harus menyediakan

rumah sebagai hak pribadi perempuan (isteri) sehingga apabila isteri tersebut diceraikan maka rumah itu menjadi hak seorang isteri.

(*Reusam* berarti keamanan. *Bentara* adalah Alat neugara yang menegakkan Adat & Hukum antara rakyat dengan rakyat, dan antara rakyat dengan neugara/kepolisian. *Laksamana*: Alat Neugara sebagai Angkatan Perang Laut untuk menghadapi bala tentara luar yang datang dari laut. *Panglima*: Alat Neugara untuk menghadapi bala tentara luar yang datang dari darat).

Dari uraian diatas, falsafah negara Aceh pada masa dahulu, telah membagi semua bidang atau keahlian tersebut pada yang memang benar-benar ahlinya. Hukum perundang-undangan suatu negara dipegang oleh sultan, hukum beragama dipegang oleh ulama, keamanan dipegang oleh aparat keamanan. Falsafah Aceh juga menunjukkan adanya partisipasi perempuan dalam memberikan sebuah peraturan. Di aceh telah lama dikenal adanya Qanun. Dan qanun tersebut banyak dihasilkan oleh perempuan. Dari segi perpolitikan, perempuan mempunyai posisi yang layak dan itu menjadi kearifan lokal di Aceh.

Berikut adalah tabel perbandingan struktur politik dan wilayah di Aceh, dengan beberapa tempat yang lain.

No	ACEH		INDONESIA		MALAYSIA		INGGRIS	
	Struktur	Penguasa	Struktur	Penguasa	Struktur	Penguasa	Struktur	Penguasa
1	Duson	Petua duson	Dusun	RT/RW	Duson			
2	Gampong	Geuchik	Desa	Lurah	Kampung		Vilage	
3	Mukim	Ulee Mukim	Kecamatan	Camat	Mukim		Sub Distric	
4	Sago	Hulu Balang Sago	Kabupaten	Bupati			Disctric	
5	Wilayah Nanggroe	Ulee Wilayah	Propinsi	Gubernur	Negri		Province	
6	Neugara	Sulthan	Negara	Presiden	Kerajaan	Raja	State	Queen

Di bidang pendidikan, jenjang pendidikan yang menjadi kearifan lokal di Aceh adalah:

No	Jenjang pendidikan	Tempat	Usia	Gelarnya
1	Tingkatan Dasar	Rangkang	6-12	
2	Tingkatan Menengah	Balai	12-18	
3	S-1	Perguruan Tinggi		Tgk
4	S-2	Perguruan Tinggi		Tgk Chik
5	S-3	Perguruan Tinggi		Syech

Banyak hal lain yang menjadi kearifan lokal yang terdapat di Aceh, namun secara umum dari segi perpolitikan dan pemerintahan secara ringkas telah dikupas diatas.

Sessi V

Judul	Demokrasi, HAM dan Partai Politik
Tujuan	Memahami pentingnya demokrasi, HAM dan Partai Politik di dalam mencapai kehidupan yang adil dan sejahtera.
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mampu memahami pentingnya demokrasi dan HAM. 2. Peserta mampu mengetahui hubungan demokrasi dan HAM. 3. Peserta memahami bahwa partai politik merupakan bagian dari proses demokrasi. 4. Peserta dapat mengetahui bahwa hak perempuan adalah bagian yang tak terpisahkan dari HAM 5. Peserta dapat memahami hak sipil, hak politik dan hak sosial ekonomi 6. Peserta terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam perjuangan demokrasi dan HAM di Aceh. 7. Peserta dapat memetakan kondisi demokrasi dan HAM di daerah masing-masing. 8. Peserta memahami bahwa partai adalah institusi untuk penyaluran aspirasi secara demokratis (bedakan dengan gerakan gerakan bersenjata). 9. Peserta memahami tentang definisi partai politik. 10. Peserta paham akan peran dan fungsi partai politik dalam merubah kondisi tertentu dalam masyarakat menjadi lebih baik. 11. Peserta memahami tentang landasan hukum, pengorganisasian dan manajemen partai politik. 12. Peserta memiliki kesiapan untuk terlibat/mendukung partai politik.
Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Definisi dan konsep tentang demokrasi dan HAM ➤ Landasan hukum nasional dan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. ➤ Landasan hukum nasional dan internasional tentang hak-hak perempuan. ➤ Gambaran implementasi Demokrasi dan HAM di Aceh. ➤ Pentingnya Partai Politik sebagai elemen demokrasi. ➤ Gambaran perjuangan Partai Politik dalam konteks politik lokal Aceh.

Metode	a. Curah pendapat b. Diskusi kelompok
Media pembelajaran	Studi kasus
Langkah kerja dan pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menanyakan ke peserta, apa yang terlintas di pikiran mereka begitu mendengar kata: demokrasi. ✓ Menuliskan semua pendapat peserta di papan tulis. ✓ Mengelompokkan atau mengklasifikasi jawaban-jawaban peserta. Misalnya: definisi, syarat dan tujuan. ✓ Mengajak peserta untuk mengkritisi kelompok-kelompok jawaban tersebut. ✓ Mematangkan bersama-sama jawaban tersebut. ✓ Memfokuskan pada kata 'hak' atau 'hak azasi manusia' yang muncul di diskusi tersebut. ✓ Menanyakan kepada peserta tentang apa yang ada di pikiran mereka jika ada kata 'hak' atau 'hak azasi manusia'. ✓ Memproses pengertian tersebut, mulai dari paradigma sampai sejarah proses perjuangannya (nasional dan internasional). ✓ Memberi penekanan kepada hak ekonomi, sosial dan kebudayaan. ✓ Memberi penekanan kepada hak-hak perempuan. ✓ Memancing peserta untuk menghubungkan antara demokrasi dan HAM. ✓ Membuat kesimpulan bersama-sama. ✓ Membagi peserta menjadi 4 kelompok. ✓ Meminta masing-masing peserta untuk mendiskusikan pentingnya partai politik dalam proses demokrasi. ✓ Berilah waktu yang cukup bagi peserta untuk melakukan diskusi kelompok. ✓ Mintalah masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi. ✓ Ajak peserta untuk mengkritisi hasil presentasi setiap kelompok. ✓ Berilah penekanan kepada soal demokrasi, HAM, dan Partai politik sebagai lembaga pendidikan dan alat perjuangan untuk mencapai cita-cita. ✓ Ajak peserta untuk memikirkan partai politik dalam konteks penegakan demokrasi dan HAM dalam politik lokal di Aceh. ✓ Buatlah kesimpulan-kesimpulan bersama. ✓ Matangkan kesimpulan-kesimpulan tersebut.
Bahan dan peralatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Metaplan ➤ Materi tentang HAM (nasional dan internasional) ➤ Materi tentang demokrasi (nasional dan internasional)
	🕒 180 menit efektif.



Lembar pembelajaran

Demokrasi, Hak Azasi Manusia (HAM) dan Partai Politik

Demokrasi, secara semantik (asal usul kata), berasal dari bahasa Yunani *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Secara sederhana berarti pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari makna tersebut tersurat pula pemahaman bahwa tidak ada “pembatasan” antara rakyat dan pemerintahan. Tidak adanya “pembatasan” itu disertai pula dengan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, kompetensi, responsivitas, solidaritas dan kesetaraan. Dari prinsip tersebut diyakini bahwa pernyataan rakyat adalah pemerintah dan pemerintah adalah rakyat dapat diwujudkan dengan mengedepankan partisipasi rakyat dan anti diskriminasi baik secara status sosial-ekonomi, ras, etnik maupun jenis kelamin.

Namun dalam praktik, masih banyak ditemui hal yang tidak sama dengan prinsip-prinsip tersebut. Akibatnya, cita-cita demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan secara langsung (*direct government*) yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu, tidak dapat diwujudkan secara langsung. Umumnya demokrasi yang sekarang dilaksanakan adalah demokrasi perwakilan karena alasan efisiensi. Gagasan tentang kedaulatan rakyat harus diatur dalam norma-norma hukum dan adat istiadat yang berlaku di suatu masyarakat.

Hubungan antara demokrasi dan HAM begitu erat. HAM merupakan hak yang perlu dimiliki oleh manusia agar dia dapat disebut manusia. Menurut kelajiman, kita mengenal adanya 3 jenis hak yaitu: hak sipil, hak politik, dan hak sosial ekonomi. Hak sipil merupakan hak yang dimiliki manusia sejak dia lahir seperti hak untuk hidup. Hak ini tidak dapat diambil oleh siapapun dengan alasan apapun. Selanjutnya hak politik. Hak ini adalah hak yang dimiliki seseorang ketika ia menjadi seorang warga negara. Beberapa contoh tentang hak politik misalnya hak untuk mengeluarkan pendapat dan berpartisipasi dalam organisasi politik. Yang ketiga adalah hak sosial ekonomi. Hak ini adalah hak warga negara untuk menjadi hidup layak sebagai manusia. Terkait dengan seluruh hak tersebut, merupakan suatu kelajiman pula bahwa negara diwajibkan untuk melindungi ketiganya. Kegagalan negara untuk melindungi ketiga hak tersebut, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja, dapat menyebabkan negara disebut telah mencederai HAM.

Dari penjelasan tersebut, kita bisa melihat bahwa demokrasi tentu saja memiliki potensi untuk mencederai HAM. Misalnya, partai pemenang pemilu membuat keputusan politik yang melakukan diskriminasi terhadap peran perempuan dalam politik. Keputusan ini, walaupun benar karena dibuat dengan suara terbanyak, dapat dipandang melanggar hak-hak politik manusia. Tindakan itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Karena itu, jika dilihat dari perspektif HAM, terdapat batas untuk menggunakan demokrasi dengan mekanisme suara terbanyak. Karena itu, demokrasi sebaiknya didefinisikan sebagai suatu proses politik yang memungkinkan manusia dengan berbagai kepentingan yang berbeda dan juga dengan latar belakang sosial, ekonomi dan budaya dapat hidup berdampingan secara damai.

Lalu bagaimana dengan partai politik? Apa yang bisa dilakukan oleh partai politik?

Pertanyaan tersebut tentu sangat berkaitan dengan demokrasi dan HAM seperti yang telah dijelaskan di atas. Partai politik adalah salah satu instrumen atau alat yang sangat penting untuk mewujudkan demokrasi. Disebut sebagai salah satu instrumen karena partai politik bukan satu-satunya instrumen. Dengan kata lain, selain partai politik, masih terdapat organisasi lainnya di masyarakat yang dapat menjadi instrumen demokrasi. Misalnya kehadiran berbagai kelompok kepentingan (*interest groups*) seperti kelompok petani, nelayan dan buruh. Partai politik menjadi instrumen penting karena ia merupakan organisasi atau wadah bagi orang untuk berkumpul dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan bersama melalui pemilihan umum. Idealnya dasar atau landasan bagi

sekelompok orang untuk berkumpul itu adalah adanya kesamaan dalam “ideologi”. Yang dimaksud dengan ideologi di sini adalah seperangkat nilai yang ingin diwujudkan oleh sekelompok orang yang berkumpul itu dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai itu biasanya sangat menyeluruh. Tidak hanya mencakup bidang politik tetapi juga, ekonomi, keamanan dan sosial-budaya.

Bagaimanakah pengertian partai politik secara hukum di Indonesia? Secara legalistis formal, UU No: 20 tahun 2007 menyebutkan bahwa partai politik harus mengandung 5 unsur berikut (1) ia merupakan suatu organisasi (2) dibentuk secara sukarela (dengan kata lain bukan melalui paksaan) (3) dibentuk karena adanya cita-cita bersama dari para anggota (bukan hanya cita-cita pemimpinya) (4) cita-cita itu menyangkut kepentingan anggota, masyarakat bangsa dan negara (5) diperjuangkan melalui pemilihan umum (tidak dengan demonstrasi kekerasan). Dari definisi ini kita bisa melihat bahwa partai politik merupakan instrumen yang sah dalam pemilihan umum. Namun dari definisi ini kita juga bisa melihat bahwa undang-undang itu tidak mensyaratkan apakah partai yang ikut pemilihan itu harus memenuhi kategori sebagai partai kader atau partai massa.

Kalau kita melihat sejarah pembentukannya, tidak semua partai politik di negara-negara yang demokratis memiliki asal-usul yang sama. Setidaknya kita bisa mengidentifikasi adanya tiga proses kelahiran yang berbeda. Proses pertama, terdapat partai politik yang lahir dari organisasi sosial kemasyarakatan. Contoh untuk ini misalnya mungkin adalah *Akbayan Citizens Action Party* di Filipina. Partai ini didirikan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM). Proses yang kedua adalah terdapat partai politik yang lahir dari kemasyarakatan dan kemudian berubah menjadi partai politik. Contoh untuk ini misalnya adalah partai-partai buruh yang ada di Eropa yang muncul dari gerakan buruh. Proses yang ketiga adalah partai politik yang lahir dari inisiatif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berasal dari organisasi kemasyarakatan dan juga bukan berasal dari gerakan kemasyarakatan. Contoh untuk partai ini misalnya mungkin dapat ditemukan dalam beberapa kelahiran partai di Indonesia setelah tahun 1998.

Kita juga kadang mendengar istilah partai terbuka dan partai tertutup. Kedua istilah ini sebenarnya terkait dengan latar belakang dari orang-orang yang menjadi anggota partai. Suatu partai disebut terbuka jika partai itu tidak membatasi latar belakang sosial, kultural dan ekonomi dari orang-orang yang dapat menjadi anggota partai. Sedangkan partai yang tertutup memberikan pembatasan-pembatasan. Dengan kata lain, dalam partai yang tertutup tidak semua orang dapat menjadi anggota partai.

Di luar kategori seperti ini, kini kita kerap pula mendengar istilah partai politik nasional dan partai politik lokal. Sebenarnya yang disebut dengan partai politik nasional adalah partai yang ikut kompetisi pemilu dalam seluruh daerah pemilihan dan tidak terbatas pada provinsi tertentu saja. Sedangkan partai lokal adalah partai yang ikut dalam kompetisi pemilu pada wilayah provinsi tertentu saja. Dalam kaitan ini, partai lokal saat ini hanya ada di Aceh dan tidak ditemukan di wilayah lain. Pembatasan pada wilayah untuk melakukan kompetisi inilah yang sebenarnya membedakan partai politik nasional dan partai politik lokal. Di luar pembatasan wilayah untuk kompetisi itu, tidak terdapat perbedaan mendasar antara fungsi yang dimiliki partai nasional dan fungsi yang dimiliki partai lokal dalam kehidupan demokrasi. Keduanya tetap memiliki lima fungsi yang telah dikemukakan sebelumnya.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, suatu partai dapat muncul dan lahir dari suatu gerakan sosial. Karena itu pula, suatu partai politik lokal juga dapat muncul dari suatu gerakan sosial. Perubahan dari suatu gerakan sosial menjadi partai politik tampaknya didorong oleh adanya keterbatasan dari gerakan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Keterbatasan itu misalnya, suatu gerakan bukanlah suatu organisasi yang dapat ikut dalam kompetisi pemilihan umum. Yang biasanya mengikuti kompetisi adalah partai politik. Disamping karena keterbatasan, dorongan perubahan dari gerakan menjadi partai politik tampaknya didorong pula oleh potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan dari suatu gerakan. Potensi itu misalnya adalah partai politik itu nantinya akan memiliki pengikut yang setia, militan, semangat juga dan kebersamaan yang tinggi dan menjadi organisasi yang solid dan terkonsolidasi.

Sessi VI

Judul	Gerakan Sosial
Tujuan	Peserta mempunyai pemahaman apa, bagaimana dan mengapa perlu gerakan sosial.
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui pengertian dan konsep gerakan sosial. 2. Peserta dapat membedakan antara organisasi yang masuk katagori gerakan sosial dan bukan gerakan sosial. 3. Peserta dapat membedakan antara partai politik dan gerakan sosial. 4. Peserta memahami kekuatan dan kelemahan gerakan sosial dalam menciptakan perubahan. 5. Peserta memiliki kesiapan untuk terlibat/mendukung gerakan sosial. 6. Peserta memahami model-model dalam gerakan sosial (3 model gerakan sosial).
Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Konsep gerakan sosial ➤ Kriteria/ciri esensi gerakan sosial ➤ Kekuatan dan kelemahan gerakan sosial (perbandingan antara gerakan sosial dan partai politik) ➤ Mengetahui perjalanan sejarah gerakan sosial di Indonesia (nasional) dan Aceh (lokal).
Metode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curah gagasan 2. Diskusi
Media pembelajaran	Studi kasus
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan kepada peserta, apa yang ada di benak mereka begitu mendengar istilah 'gerakan sosial'. Kalau cara ini kurang berjalan, bagikan metaplan kepada setiap peserta, dan minta mereka menuliskan. 2. Catat semua jawaban, dan kelompokkan misalnya antara yang berpendapat positif dan negatif. 3. Uraikanlah sebuah contoh kecil tentang gerakan sosial. 4. Berilah kesempatan kepada peserta untuk memberi pendapat tentang contoh yang telah dipaparkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Ajaklah bersama-sama untuk mendapatkan gagasan dan definisi yang benar tentang gerakan sosial. 6. Ajaklah peserta untuk berpikir dengan melempar pertanyaan, apa perbedaan partai politik dan gerakan sosial. 7. Cek jawaban peserta dengan konsep yang telah sama-sama diproses. 8. Ajaklah peserta untuk membuat butir-butir kesimpulan. 9. Tanyakan kepada peserta apa perbedaan gerakan sosial dan partai politik. 10. Ajaklah peserta untuk mengkritisi jawaban-jawaban yang muncul. 11. Ajaklah peserta untuk bersama-sama memahami bahwa gerakan sosial mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding partai politik, namun partai politik bisa menjadi bagian dari gerakan sosial. 12. Mintalah peserta untuk memberikan sebuah kasus yang terjadi di sekitar kehidupan mereka (yang saat ini masih berlangsung). 13. Mintalah kepada semua peserta untuk melihat kasus tersebut dengan membuat 'pohon masalah'. 14. Ajaklah peserta untuk berpikir bagaimana menyelesaikan kasus tersebut, dengan melihat potensi kelompok-kelompok masyarakat yang bisa diajak untuk menyelesaikan masalah tersebut. 15. Paparkan bahwa contoh kecil tersebut sesungguhnya adalah sebuah gerakan sosial.
Bahan dan peralatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas metaplan 2. Hand out
Waktu	⌚ 90 menit efektif



Lembar pembelajaran

Gerakan Sosial; Model, Peluang dan Tantangan.

Oleh : Saleh Abdullah

Dari sudut pandang sosiologi gerakan sosial (*social movements*), para ahli bersepakat tentang apa yang disebut sebagai gerakan sosial: sebuah tindakan terencana (baik secara rasional maupun irasional) bagi sebuah perubahan, dan sebagai tantangan non-institusional terhadap lembaga-lembaga resmi. Sedangkan kelompok-kelompok atau aktor-aktor gerakan tersebut melintasi spektrum yang bervariasi dari ekstrem kanan ke ekstrem kiri. Gerakan neo-Nazi, neo-fasis, ultra nasionalis, gerakan para profesional, gerakan buruh, gerakan petani, gerakan lingkungan, gerakan feminis, gerakan kiri baru (*new left*), gerakan anarkis, hingga gerakan fundamentalis keagamaan masuk dalam kategori gerakan sosial.

Dengan spektrum yang lumayan luas ini, para ahli sosiologi gerakan sosial membagi gerakan sosial ke dalam beberapa model: *collective behaviour* (gerakan yang lebih didasarkan pada kesamaan keyakinan eksklusif); *resource mobilization* (gerakan yang senantiasa berupaya memobilisasi dan mengkonsolidasikan berbagai bentuk sumberdaya alam dan manusia untuk memperkuat gerakannya); *action-identity approach* (gerakan yang mendasari gerakannya hanya pada aksi melulu, dan biasanya bersifat reaktif dan tidak berjangka panjang). Sementara formulasi terakhir yang mencoba meringkas dan memudahkan pembagian model itu menjadi: Penekanan pada aspek irasional; Gerakan kemasyarakatan sebagai aktor rasional di dalam struktur sosial; dan Gerakan-gerakan dekonstruksi (periode ketiga).

Pertemuan-pertemuan semacam *Asian Social Forum* di Hyderabad, dan *World Social Forum* di Bombay, *Global Village* di Finlandia, *Jubilee 2000*, aksi-aksi masif menolak pertemuan-pertemuan WTO dan sebagainya seperti yang terjadi di Seattle, Genoa, Prague, adalah bentuk-bentuk gerakan sosial baru dengan agenda-agenda ideologis yang jelas dalam melawan neo-liberalisme.

Di Indonesia, nampaknya, model action identity atau Gerakan-Gerakan Dekonstruksi yang banyak terjadi di kalangan aktivis NGO. Model-model ini sesungguhnya agak “berbau liberal” karena akan menghambat proses konsolidasi kekuatan gerakan sosial secara lambat tapi pasti. Gerakan kaum aktivis kemudian menjadi “apolitis” dalam arti enggan atau bahkan alergi dengan pendekatan politik, dan kemungkinan besar, ini juga yang menjadi penyebab terus terfragmentasinya gerakan kaum aktivis di Indonesia. Demokrasi bukan hanya dibajak oleh banyak agen-agen neo-liberal, bahkan lebih jauh lagi, demokrasi telah dibuat mandek oleh para aktivis Indonesia, kemandekan yang dimulai dari dirinya sendiri.

Peluang masih ada! Kaum aktivis harus mulai sadar dan mengevaluasi pendekatan-pendekatan gerakannya. Proses-proses penyadaran dan pendidikan politik mungkin harus dilihat dalam suatu jalinan kekuatan dan arah strategis yang terkonsolidasi dan mengarah pada proses transformasi sosial. Konsolidasi di sini sama sekali bukan berarti “penyatuan” yang menafikan perbedaan. Perbedaan harus tetap mendapat tempat dan dilihat sebagai keindahan dan kekuatan yang beragam.

Untuk memulai itu semua, pada tahap identifikasi diri, sangat perlu untuk mendefinisikan makna baru gerakan sosial model apa yang akan diambil. Model kedua, *resource mobilization*, atau gerakan kemasyarakatan sebagai aktor rasional di dalam struktur sosial, mungkin akan membantu banyak proses konsolidasi tersebut.

Aceh yang relatif masih kaya akan sumberdaya alam di satu sisi, dan mempunyai sejarah penderitaan penistaan kemanusiaan yang panjang yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan sosial dan gerakan bersenjata di sisi lain, setelah proses perdamaian yang kemudian melahirkan kesepa-

katan damai itu, saat ini, berada dalam dalam satu titik momentum bersejarah di mana kekuatan-kekuatan sosial dan politik yang beragam berada dalam satu ujian menentukan. Bila proses konsolidasi kekuatan-kekuatan sosial dan politik itu gagal terjadi dan terus menjadi fragmentasi, maka biasanya berdasarkan fakta sejarah yang terjadi di banyak negara, yang terjadi kemudian adalah proses pembusukan ke dalam. Karena sebuah momentum tidak lahir setiap saat, sehingga keterlambatan menyikapinya akan berakibat set-back; langkah mundur!

Inilah tantangan nyata gerakan sosial; secara internal, bila tidak segera diantisipasi dengan melakukan konsolidasi, dan sebaliknya terus-menerus menggantungkan diri pada pihak luar, maka akan sulit memberikan ramalan menggembirakan bagi masa depan.

Salah satu bentuk gerakan sosial yang ada di Aceh yang penting saat ini bagi penjaminan proses demokratisasi dan perdamaian adalah Liga Inong Aceh (LINA). LINA menjadi penting karena beberapa hal:

- Fakta demografis (jumlah penduduk) Aceh, di mana jumlah perempuan pasti lebih banyak. Bukan hanya di Aceh, di Indonesia dan bahkan di dunia, jumlah perempuan lebih banyak. Tingkat harapan hidup perempuan di Indonesia dan dunia juga lebih banyak di banding laki-laki. Hal ini menunjukkan fakta biologis yang tidak bisa dibantah; Perempuan jauh lebih kuat dari laki-laki!
- Fakta demografis penduduk Aceh itu pasti akan mempengaruhi jumlah seluruh suara perempuan pemilih di Aceh, di mana jumlah pemilih perempuan pasti lebih banyak dari jumlah suara pemilih laki-laki.
- Fakta juga bahwa sebuah organisasi atau institusi politik tidak akan bisa eksis tanpa basis konstituennya. Dan mayoritas basis konstituen itu adalah perempuan.
- Dengan semua pertimbangan di atas, sulit untuk membantah bahwa perempuan, dan juga LINA mempunyai posisi sangat strategis bagi masa depan demokrasi dan perdamaian di Aceh.





Bahan Bacaan:

Organisasi Rakyat dan Gerakan Sosial

Oleh: Arie Sujito

Di jaman orde baru, tindakan negara yang melarang warganya berorganisasi melalui disain *state corporatism*, yakni hanya mengalirkan aspirasi rakyat ke dalam kanal-kanal lembaga bentukan pemerintah telah melahirkan petaka. Rakyat tidak berdaya karena terkerangkeng oleh otoriterisme, dan sistem politik tidak lebih sebagai ajang dominasi sang pemilik otoritas. Fungsinya sebagai penyumbat kebebasan warga. Tak heran, jika politik berasosiasi sebagai pentas mobilisasi, bersemayamnya kesadaran semu, ajang represi, praktik kooptasi dan manipulasi. Pada saat itu, organisasi warga ibarat boneka, dimainkan oleh penguasa yang bertindak sebagai dalang pada drama akrobatik. Nafsu kekuasaan adalah menjinakkan kesadaran rakyatnya. (Mas' oed, 1989)

Segalanya serba diatur negara dengan cara sewenang-wenang. Mungkin dapat diambil contoh tentang perlakuan negara terhadap warga di desa-desa, dimana aparat pemerintah desa selalu bertindak menentukan jalannya arus politik (baik pada tingkat formal maupun *everyday politic*), yang melampaui kewenangan sesungguhnya. Resikonya, rakyat menjadi tidak berdaya (*powerless*), tidak mandiri, lalu terjadi ketergantungan, bahkan mengalami kematian partisipasi dan inisiatif. Disanalah bentuk-bentuk mobilisasi, eksploitasi dan domestikasi terus berlangsung sebagai manifestasi *grand project* negara model orde baru yakni kepentingan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, untuk pembangunan. Pada era itulah diberlakukan secara efektif, apa yang diistilahkan dengan (a) *depolitisasi*, (b) *deideologisasi* dan (c) *floating mass*. (Pabottingi, 1995)

Itu semua memang cerita masa lalu, yang kelim. Sejak struktur kekuasaan bergeser melalui pergelaran reformasi tahun 1998 lalu, tentu memiliki nuansa perbedaan mendasar. Secara normatif, citra dan fungsi negara dipahami bukan lagi sentrum kekuasaan penentu kehidupan warganya. Sebaliknya, kedaulatan ada di tangan rakyat. Berarti menempatkan rakyat sebagai subjek kekuasaan yang menjalankan kehendaknya secara langsung (disebutnya dengan demokrasi langsung) dan mewakilkannya sesuai dengan selera (politik representasi dan demokrasi perwakilan). Dengan demikian, fungsi negara sesungguhnya justru melayani, memenuhi hak-hak warganya melalui birokrasi dan lembaga-lembaga lainnya. Itulah prinsip demokrasi substantif. (Demos, 2003)

Dalam konteks itulah pertanyaannya yang perlu dijawab adalah (1) di masa perubahan saat ini apakah fungsi rakyat sebagai subjek politik sudah terwujud? (2) bagaimana peluang menguatkan organisasi rakyat (ORA) melalui gerakan sosial sebagai bagian dari *civil society* dalam menjalankan demokrasi di level lokal? (3) apa kelemahan mendasar dan potensi yang dimiliki, sehingga proses penguatan ORA dapat dijalankan? (4) bagaimana strategi memperkuat ORA dalam proses politik pada kegiatan di sektor sosial, ekonomi dan budaya? (5) Bagaimana mengefektifkan ORA sebagai instrumen artikulatif kepentingan rakyat di tingkat lokal, sehingga mampu menjadi organisasi berkelanjutan?

Perkembangan lima tahun sejak liberalisasi politik, fenomena ledakan partisipasi warga tidak terbendung lagi, di berbagai tingkatan. Kebangkitan rakyat yang tercermin dari menjamurnya asosiasi, organisasi, atau semacam perhimpunan dst, di sejumlah sektor merupakan indikator dasar semaian inisiasi warga kian subur. (IRE, 2000) Para petani, buruh, pedagang kaki lima, pedagang warungan, pengrajin, perempuan, membentuk organisasi yang dijadikan sebagai media partisipasi untuk mengelola kepentingan. kondisi semacam ini secara objektif karena pengaturan organisasi tidak seketat dulu. Mekanismenya relatif longgar dan tidak birokratis di satu sisi, dan keberanian rakyat untuk berpartisipasi juga kian meningkat di sisi lain.

Artinya, kinilah saat dan kesempatan membangun organisasi yang kokoh yang mampu dijadikan sebagai alat perjuangan warga. Sebagaimana kita tahu, kekuatan penting dalam proses politik di tingkat masyarakat bawah, adalah organisasi rakyat (ORA). Kalau boleh berteori, ORA merupakan bagian dari *civil society*. Perannya adalah memberikan keseimbangan terhadap institusi negara (pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya) serta *political society* (semacam partai politik). Apa manfaat-manfaat mendasar organisasi itu?

Pertama, menjadi ladang strategis untuk membangun solidaritas sosial dalam nasib dan kepentingan (berbasis kelas); *kedua*, menjadi arena belajar bersama diantara anggota (untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan akses ekonomi atau politik); *ketiga*, membuat jaringan dan mempererat persahabatan; *keempat*, membuat kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan minatnya; *kelima*, menjadi fungsi kontrol komunitas anggota. Dalam kaitan itulah, keaktifan berorganisasi jelas banyak manfaatnya. Dengan manfaat seperti itulah, maka berorganisasi bagi warga sipil, seperti halnya para pedagang kaki lima atau kaum miksin kota sangat dibutuhkan. Bagaimana kenyataan ORA dalam suasana seperti itu? Dalam perkembangan politik sejauh ini, juga didasarkan pengalaman, ternyata munculnya ORA belum menjadi kekuatan penyeimbang efektif institusi negara atau masyarakat politik, secara konkrit. Kendatipun muncul partisipasi, seperti aktivitas protes sosial dalam bentuk komite aksi, kegiatan sosial-ekonomi mandiri yang menjauhkan dari intervensi negara, adanya jaringan antar kelompok di berbagai sektor, tetapi nampaknya belum menjadi tolok ukur konkrit kekuatan sipil bagai proses perubahan nasib dirinya, ketika harus berhadapan dengan kelompok atau kekuatan-kekuatan lain. Hal yang mudah kita lihat adalah, mengenai keterlibatan dalam hal penentuan kebijakan menyangkut kepentingan warga. Sejumlah kasus, di beberapa daerah, fungsi rakyat sebagai subjek yang terepresentasi dalam lembaga-lembaga politik masih “semu”. Aspirasi yang disuarakan oleh organisasi, kadang-kadang masih kandas dan gagal. Kasus-kasus penggusuran terhadap pedagang kaki lima, atau tukang becak dan kaum miskin kota lain dapat disebut beberapa bukti mengenai masih lemahnya organisasi ini sebagai alat perjuangan. Dengan kata lain, perkembangan partisipasi di era perubahan hanyalah menghasilkan rakyat sebagai subyek “kedalam” ORA, tetapi ketika berinteraksi dengan kekuatan lain masih menjadi objek.

Berikut ini beberapa persoalan dasar yang masih dialami ORA sejauh ini, serta beberapa formula penting yang perlu dilakukan:

Pertama, pengetahuan berorganisasi lemah. Pada prinsipnya, pengetahuan mengenai seluk beluk berorganisasi itu penting bagi para anggota. Terutama menyangkut manfaat, cara membentuk, mengurus, menghidupi dan menjaga kelangsungan organisasi dan kepentingan bersama. Hal itu sebagai syarat utama, agar organisasi ini dapat berlanjut dalam waktu lama, serta sesuai dengan cita-cita anggotanya.

Kedua, partisipasi dan keaktifan anggota yang lemah. Akibat lemahnya partisipasi anggota ini, yang paling nyata adalah organisasi menjadi tidak berkembang padahal usianya sudah lama. Pada umumnya gerak organisasi hanya mengandalkan orang-orang tertentu saja, tanpa dukungan keterlibatan anggota secara memadai. Ibaratnya, organisasi hanya merasa “dimiliki pengurus” karena anggota pada “cuek”. Tentu saja hal seperti ini tidak sehat dan butuh uluran tangan bersama, baik dalam hal manfaat maupun tanggungjawabnya. Karena itu, harus ada pembagian kerja yang baik, terkontrol dan tanggungjawab secara proporsional.

Ketiga, ketergantungan pada pihak luar yang tinggi, atau organisasi kurang mandiri. Gejala ini dapat dilihat dari lemahnya kreativitas organisasi, baik pengurus atau anggota untuk mengambil inisiatif membangun organisasi. Fenomena ini dapat dirasakan, misalnya selalu meminta petunjuk, bantuan atau perintah dari luar terus-menerus. Kalau tidak ada stimulan dari pihak-pihak luar, dalam bentuk ajakan atau fasilitasi maka tidak ada kegiatan atau program yang dilaksanakan. *Nah* repotnya, banyak organisasi akhirnya sebatas “papan nama”, yang hanya ada papan dan pengurusnya saja, tetapi tidak ada aktivitasnya, apalagi partisipasi anggota. Masalah ini penting dipikirkan bagai-

mana agar organisasi mandiri punya program, dana, keaktifan pengurus dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Keempat, kurang konsisten dalam kesepakatan. Berbagai perencanaan kegiatan atau program, biasanya tidak dilanjutkan dilanjutkan dengan pelaksanaan, evaluasi dan kontrol serta kemanfaatannya. Akibatnya, terlalu banyak rencana. Konsistensi dalam keempat hal itu perlu dilakukan agar organisasi bisa dipercaya (melahirkan kredibilitas kuat) dalam setiap agenda kegiatan. Misalnya mengenai agenda dan kesepakatan, tentu harus dijalankan bagaimana pun mekanisme. Apakah oleh pengurusnya, ataukah melalui partisipasi penuh para anggota secara keseluruhan.

Kelima, pengetahuan dan ketrampilan pengurus yang masih rendah. Pengurus itu ditunjuk atau dipilih karena didukung anggota, berdasarkan kompetensi dan kemampuannya. Oleh karena itu, pengurus hendaknya memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam menjalankan amanat anggota organisasi. Berkaitan dengan hal semacam ini, pengurus hendaknya mengambil inisiatif mencari dan memperoleh pengetahuan berorganisasi supaya roda organisasi dapat berjalan, dari manapun. Kepekaan sungguh diperlukan bagi pengurus untuk hal-hal seperti ini, supaya organisasi berjalan.

Keenam, solidaritas antar anggota masih kurang, cenderung individual. Masalah semacam ini, memang sangat menyulitkan organisasi. Padahal, organisasi diperlukan agar kerjasama antar anggota dijalankan, dan disanalah membutuhkan solidaritas yang berkaitan dengan kepentingan bersama diantara anggota dan pengurus. Hal penting untuk dilakukan misalnya, menumbuhkan rasa saling memiliki, merasa dan tanggungjawab bersama dalam tugas dan kemanfaatannya, serta pembagian kerja yang sehat. Jika seseorang anggota menghadapi masalah, maka anggota lain juga ikut merasakan, sekaligus membantu memecahkan masalah tersebut, jangan menutup diri dan individualistik.

Ketujuh, keterbatasan dana untuk organisasi. Persoalan hidup tidaknya sebuah organisasi juga dipengaruhi oleh faktor dana, bahkan sangat krusial. Sejauh ini pengalaman membuat terobosan untuk menabung, pengadaan produk untuk *fundrising* (mendapatkan sumber pendapatan alternatif) dalam usaha organisasi perlu ditempuh untuk mengatasi pendanaan semacam ini. hal ini tentu dimaksudkan agar organisasi juga mampu mandiri dalam kelangsungan program.

Kedelapan, kaderisasi dan kepemimpinan yang belum mantap. Bagaimanapun majunya suatu organisasi, jika tidak mempersiapkan kaderisasi dan kepemimpinan maka pada saatnya akan menghadapi kendala. Maksudnya adalah, organisasi dihadapkan tantangan dan kesempatan yang ada sejauh ini perlu memikirkan pentingnya mengkader para pengelola (manajer dan pemimpin) organisasi yang handal, kreatif, inovatif, berwatak maju dan demokratis, yang nantinya menjadi kekuatan penggerak dalam organisasi secara lebih aktif dan efektif.

Akhirnya, agenda besar yang harus dilakukan, mempertimbangkan kondisi dan perkembangan yang terjadi (sosial, politik, ekonomi dan budaya), yakni membangun organisasi rakyat yang kuat, sehat dan berkelanjutan, dengan menerapkan prinsip demokrasi untuk keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan anggota. Lalu, apa kira-kira yang harus dilakukan bagi organisasi dalam rangka menjawab masalah dan kebutuhan di atas? Perlunya menerapkan nilai-nilai partisipasi (keikutsertaan pengurus dan anggota), transparansi (keterbukaan dalam aturan main dan kesepakatan), kontrol (pengawasan bersama atas jalannya organisasi) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban dalam akvitas), dalam menjawab problem-problem di atas. Saatnyalah, organisasi belajar menerapkan nilai-nilai tersebut untuk bisa menjadi besar dan dapat diandalkan sebagai alat perjuangan anggota. Suatu organisasi yang bebas KKN, tidak sewenang-wenang, berjalan sehat dan berkelanjutan.***

Sessi VII

Judul	Budaya Kesadaran Kritis Bagi Pelaku Gerakan Sosial
Tujuan	Memperkenalkan prespektif kesadaran kritis dalam memahami varian gerakan sosial, terutama di tingkat lokal (Aceh)
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui perbedaan cara pandang magis, naif dan kritis. 2. Peserta memahami elemen 'paradigma' dan 'metodologi' di dalam skema cara pandang magis, naif dan kritis. 3. Peserta memiliki cara pandang kritis dalam melihat berbagai persoalan di Aceh terutama yang terakit kasus-kasus perempuan.
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pandang kritis atau kesadaran dalam melihat permasalahan sosial. 2. Cara pandang kritis di dalam menyelesaikan permasalahan sosial.
Metode	<ol style="list-style-type: none"> a. Curah pendapat b. Diskusi
Media pembelajaran	Studi kasus
Langkah kerja dan pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Beri penyegaran kepada peserta tentang poin-poin penting di sesi sebelumnya: Gerakan sosial. Karena materi ini akan mengkritisi hal tersebut dari sisi paradigma dan metodologi. ✓ Tanyakan kepada peserta, misalnya pertanyaan: Mengapa ada orang yang miskin? ✓ Kelompokkan jawaban peserta menjadi tiga kelompok: yang mengatakan takdir, yang menyalahkan manusia, yang mengkritisi problem struktural. ✓ Ajaklah peserta untuk mengkritisi tiga kelompok jawaban tersebut, dan beri penjelasan bahwa kelompok pertama disebut kesadaran magis, kelompok kedua: kesadaran naif, kelompok ketiga: kesadaran kritis. ✓ Mintalah kepada peserta untuk memberi sebuah contoh kasus yang terjadi di sekeliling mereka (kalau bisa yang sedang berlangsung, dan lebih baik yang terkait perempuan). ✓ Ajaklah peserta untuk melihat bagaimana persoalan tersebut dicoba diselesaikan dengan beragam cara.

Langkah kerja dan pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Beri penyegaran kepada peserta tentang poin-poin penting di sesi sebelumnya: Gerakan sosial. Karena materi ini akan mengkritisi hal tersebut dari sisi paradigma dan metodologi. ✓ Tanyakan kepada peserta, misalnya pertanyaan: Mengapa ada orang yang miskin? ✓ Kelompokkan jawaban peserta menjadi tiga kelompok: yang mengatakan takdir, yang menyalahkan manusia, yang mengkritisi problem struktural. ✓ Ajaklah peserta untuk mengkritisi tiga kelompok jawaban tersebut, dan beri penjelasan bahwa kelompok pertama disebut kesadaran magis, kelompok kedua: kesadaran naif, kelompok ketiga: kesadaran kritis. ✓ Mintalah kepada peserta untuk memberi sebuah contoh kasus yang terjadi di sekeliling mereka (kalau bisa yang sedang berlangsung, dan lebih baik yang terkait perempuan). ✓ Ajaklah peserta untuk melihat bagaimana persoalan tersebut dicoba diselesaikan dengan beragam cara. ✓ Ajaklah peserta untuk mengelompokkan ragam cara itu ke dalam tiga kelompok cara pandang: magis, naif dan kritis. ✓ Ajaklah peserta untuk mengkritisi kelemahan cara pandang magis dan naif beserta konsekuensinya. ✓ Ajaklah peserta untuk mempertajam penyelesaian dengan cara pandang kritis, dalam taraf praksis. ✓ Ajaklah peserta untuk membuat poin-poin kesimpulan.
Bahan dan peralatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kertas metaplan ➤ Contoh kasus
Waktu	<ul style="list-style-type: none"> ⌚ 90 menit efektif



Kesadaran Kritis Bagi Pelaku Gerakan Sosial

Apakah yang dimaksud dengan “kesadaran kritis”? Mengapa “kesadaran kritis” menjadi sangat penting bagi para pelaku gerakan sosial? Tulisan berikut mencoba memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan ini dengan merujuk pada karya Paulo Freire.

Kalau kita merujuk pada pemikiran Freire, kesadaran kritis berarti adanya dua kemampuan. Pertama, kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat beragam sumber penindasan di masyarakat, baik yang berasal dari penindasan secara sosial, politik, dan ekonomi. Kedua, kemampuan untuk melawan berbagai elemen penindasan yang terjadi di dalam masyarakat itu. Dengan kata lain, seseorang disebut memiliki kesadaran kritis, jika ia tidak sekadar mampu untuk melihat penindasan yang tengah terjadi di masyarakat tetapi sekaligus ia diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk menghilangkan penindasan itu. Dalam kaitan ini, kesadaran kritis harus dibedakan dari dua jenis kesadaran lainnya yaitu kesadaran magis dan kesadaran naif.

Yang dimaksud dengan kesadaran magis adalah suatu kesadaran “maya”. Artinya bukan kesadaran yang nyata. Seseorang disebut memiliki kesadaran magis, jika seseorang menerima kenyataan sebagaimana adanya dan menganggap kemiskinan itu sebagai takdir. Dalam situasi kesadaran seperti ini, seseorang yang memiliki kesadaran magis tentu saja akan sangat sukar diharapkan untuk melakukan perubahan. Pandangannya tentang konsep perubahan adalah surat nasib. Perubahan hanya mungkin terjadi jika ada kekuatan lain yang tidak bisa dijelaskan secara nalar/pikiran datang untuk melakukan perubahan itu.

Banyak contoh kasus yang bisa diberikan untuk melihat kesadaran magis ini. Salah satu contoh kasus misalnya adalah terkait dengan isu kemiskinan. Jika seseorang merasa bahwa kemiskinan yang dia hadapi adalah takdir maka ia dapat dianggap memiliki kesadaran magis. Ia tidak dapat melihat bahwa kemiskinan yang ia alami sebenarnya adalah karena adanya kekuatan-kekuatan lain di masyarakat yang berada di luar kendali dirinya (misalnya karena kemauan Sang Ilahi atau karena alam) yang telah secara sistematis membuat ia tetap miskin. Kekuatan-kekuatan itu telah mengendalikan negara yang menyebabkan tidak adanya keputusan politik yang membuat seseorang yang miskin harus mendapatkan pendidikan dan sumber daya/alat produksi agar dapat membuat ia keluar dari jerat-jerat kemiskinan. Secara politik, orang yang memiliki kesadaran magis dalam isu kemiskinan tidak pernah melihat bahwa negara memiliki kewajiban untuk memihak kepada kelompok orang miskin.

Kesadaran kritis juga berbeda dengan kesadaran naif. Seseorang disebut memiliki kesadaran naif, jika ia memiliki pemikiran dan keyakinan bahwa sebab-sebab dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya berasal dari dirinya semata. Dalam contoh kasus isu kemiskinan misalnya, seseorang dianggap memiliki kesadaran naif jika kemiskinan yang dialaminya dijelaskan dari ketiadaan semangat kerja keras. Dengan kata lain, penyebab kemiskinan harus dijelaskan dari faktor “dirinya” sendiri dan bukan dari luar dirinya. Karena itu orang-orang yang memiliki kesadaran naif akan selalu mengatakan bahwa upaya untuk mengeluarkan seseorang dari kemiskinan adalah jika seseorang itu memiliki kreativitas, semangat etos kerja keras, dan memiliki semangat untuk mengubah dirinya menuju lebih baik. Tanpa semangat itu, maka ia akan tetap miskin. Secara akademis, semangat ini sering juga disebut dengan kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan prestasi (*needs for achievement*). Akhirnya, seseorang yang berkesadaran naif akan cenderung menyalahkan korban (*blaming the victim*).

Baik kesadaran magis maupun kesadaran naif membawa dampak-dampak buruk dalam melakukan dialog dan analisis untuk perubahan. Jika cara berpikir seseorang sangat dipengaruhi kesadaran magis, maka hampir bisa dipastikan orang itu tidak mampu melakukan analisis yang menghubungkan berbagai faktor mengapa ia menjadi miskin. Ia hanya akan menjelaskan satu faktor saja yaitu misalnya karena takdir Ilahi atau karena kemauan alam. Faktor tunggal ini juga tidak akan bisa ia ubah.

Walau tidak sesederhana kesadaran magis, namun kesadaran naif juga terjebak dalam kecenderungan untuk melakukan penyederhanaan ketika melakukan dialog dan analisis tentang perubahan. Ciri khas dari kesadaran naif yang selalu tampak ketika melakukan dialog adalah terpolanya hubungan antara dua pihak yaitu antara kelompok yang merasa dirinya "superior" (lebih tahu) dengan kelompok yang lebih "inferior" (lebih rendah). Kelompok yang "superior" akan mendiktekan kepada kelompok yang "inferior" tentang apa yang harus dilakukan.

Dialog seperti ini sebenarnya samasekali tidak dapat disebut sebagai dialog dua arah tetapi menjadi satu arah. Karena sifatnya yang satu arah itu, maka dialog dalam kesadaran naif seperti ini gampang untuk diselewengkan demi kepentingan kelompok yang merasa dirinya lebih "superior". Misalnya, jika kelompok "superior" menyatakan bahwa sumber kemiskinan adalah karena buku-buku pelajaran yang tidak tersedia bagi anak-anak orang miskin. Karena itu pemecahannya adalah penyediaan buku. Tanpa melihat kualitas dan muatan buku itu. Namun bisa saja terjadi bahwa pemecahan yang ditawarkan ini telah dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi kelompok "superior" itu. Kelompok yang superior itu mungkin bermaksud untuk menjual buku-buku yang mereka hasilkan. Kemiskinan kemudian hanya dipahami dan dikerjakan sebagai suatu "proyek".

Kesadaran kritis, karena itu, merupakan kesadaran yang berlawanan dan menentang kesadaran magis maupun kesadaran naif. Jika kesadaran magis dan naif cenderung untuk melestarikan status quo, maka kesadaran kritis cenderung mendorong perubahan. Secara sederhana kita bisa pula menyatakan bahwa kesadaran kritis merupakan tahapan tertinggi dari perjalanan kesadaran manusia. Ia disebut sebagai kesadaran tertinggi karena beberapa alasan berikut.

Pertama, kesadaran kritis tidak hanya sampai pada tahap analitis tetapi juga hingga praksis. Tidak hanya sampai pada kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai sumber penindasan tetapi juga kemampuan untuk melawan penindasan itu.

Kedua, kesadaran kritis memiliki kemampuan memahami persoalan sosial secara komprehensif (menyeluruh). Yang dimaksud dengan menyeluruh di sini adalah mulai dari kemampuan untuk melakukan pemetaan masalah, hubungan atau kait antara berbagai unsur yang mempengaruhi suatu masalah, dan pemecahan alternatif terhadap masalah.

Ketiga, kesadaran kritis biasanya menghindarkan diri dari kesimpulan yang menyalahkan orang yang menghadapi masalah (*blaming the victims*). Misalnya, seseorang yang memiliki kesadaran kritis tidak akan serta merta menyalahkan orang yang miskin ketika menganalisis kemiskinan. Ia akan terlebih dahulu secara bersama mengajak korban untuk mempelajari faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik serta budaya yang berada di luar orang yang miskin itu. Kesadaran tentang berbagai faktor di luar kelompok yang miskin ini disebut analisis struktur dan sistem. Karena tekanannya pada upaya identifikasi masalah dan pemecahan secara bersama maka kesadaran kritis tentu saja akan menciptakan tradisi dialog dan argumentatif.

Demikian pentingnya manfaat kesadaran kritis ini, tentu saja kita perlu mengetahui bagaimanakah kesadaran kritis dapat ditumbuhkan. Setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah pendidikan yang dilaksanakan harus didasarkan pada kenyataan. Yang dimaksud dengan berdasarkan kenyataan adalah yang dekat dengan kehidupan sosial anak didik. Syarat kedua adalah pendidikan harus dilaksanakan dalam suasana demokratis. Persyaratan seperti ini dalam praktik akan terlihat jika pendidik tidak merasa lebih "superior" dari anak didik.

Tetapi jika pendidik merasa paling “berpengetahuan” dibandingkan dengan anak didik, maka suasana demokratis tidak akan tercipta. Syarat ketiga adalah adanya kemauan dari pendidik dan anak didik untuk mau menerima perbedaan. Syarat ini sangat penting karena dalam pemikiran kesadaran kritis tidak diterima pandangan bahwa suatu masalah memiliki penyebab yang sama untuk semua wilayah. Juga tidak menerima pandangan bahwa ada satu solusi untuk semua masalah. Karena lingkungan sangat memainkan peran penting, maka bagi kalangan kesadaran kritis suatu masalah mungkin memiliki pemecahan yang berbeda untuk wilayah yang berbeda. Ringkasnya pemetaan masalah secara bersama oleh anak didik dan pendidik menjadi syarat bagi berkembangnya pemikiran kritis.

Sessi VIII

Judul	Kepemimpinan Perempuan dan Partisipasi Politik
Tujuan	Memahami pentingnya kepemimpinan perempuan di ranah politik dan kerja praktisnya.
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami pentingnya partisipasi perempuan di ranah politik. 2. Peserta memahami pentingnya kepemimpinan perempuan di ranah politik. 3. Peserta mengetahui keterlibatan perempuan dalam gerakan sosial-politik di berbagai negara di dunia 4. Memotivasi partisipasi perempuan dalam dunia politik dengan pengalaman dari luar dan dari dalam (Aceh). 5. Mengkritisi faktor-faktor yang menghambat perempuan berpolitik. 6. Peserta mengetahui konsep kepemimpinan perempuan. 7. Memotivasi keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat gampong.
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan dan politik. 2. Pengalaman partisipasi politik perempuan di beberapa negara. 3. Pengalaman partisipasi kepemimpinan perempuan di Aceh. 4. Konsep kepemimpinan perempuan. 5. Melihat gampong sebagai wilayah yang strategis. 6. Kepemimpinan perempuan di tingkat gampong.
Metode	<ol style="list-style-type: none"> a. Curah pendapat b. Diskusi c. Simulasi
Media pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Hand out • Studi kasus
Langkah kerja dan pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tanyakan kepada peserta, apa yang selama ini dimengerti secara konvensional perbedaan antara laki-laki dan perempuan. ✓ Catatlah jawaban-jawaban yang muncul di papan tulis.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelompokkan jawaban-jawaban yang ada dalam dua kategori, antara yang biologis-natural (misalnya menstruasi), dengan yang konstruksi sosial (misalnya laki-laki kuat, perempuan lemah). ✓ Ajaklah untuk mengkritisi terutama yang berupa konstruksi sosial, misalnya dengan menanyakan benarkah laki-laki lebih kuat? Tunjukkan contoh-contoh bahwa ada banyak perempuan yang lebih kuat dibanding laki-laki. ✓ Ajaklah peserta untuk merefleksikan itu semua, dan mencari sebab mengapa perempuan sering dimarginalkan dalam konstruksi sosial tersebut, misalnya: kesempatan, pendidikan, pelibatan, dll. ✓ Uraikanlah materi tentang perjuangan perempuan dalam bidang sosial-politik, baik konteks internasional, nasional maupun lokal. ✓ Ajaklah peserta untuk mematangkan uraian tersebut. ✓ Mintalah para peserta untuk melihat kondisi sekitar, tentang potensi-potensi perempuan di bidang sosial dan politik. ✓ Tajamkanlah dengan membuat daftar potensi tersebut, seperti misalnya: perempuan lebih solid, perempuan lebih tahu masalah riil, perempuan lebih empatik, perempuan lebih menyukai perdamaian dan anti kekerasan, dll. ✓ Uraikanlah sebuah prinsip-prinsip penting kepemimpinan dan ajaklah peserta untuk merefleksikan hal tersebut. ✓ Bagilah peserta menjadi 4 kelompok, dan beri masing-masing kelompok persoalan riil yang ada di sekeliling mereka, mintalah agar masing-masing kelompok membuat simulai pemecahan masalah. ✓ Beri waktu yang cukup bagi mereka untuk mendiskusikan hal tersebut. ✓ Mintalah masing-masing kelompok untuk mensimulasikan. ✓ Ajaklah setiap peserta untuk mengkritisi dan mematangkan simulasi-simulasi yang ada. ✓ Ajaklah peserta untuk membuat butir-butir kesimpulan.
Bahan dan peralatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kertas metaplan • Infocus
Waktu	<ul style="list-style-type: none"> ➡ 120 menit efektif



Lembar pembelajaran

Kepemimpinan perempuan dan partisipasi politik

Persoalan perempuan bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan aspek-aspek lain. Oleh karena itu perlu dilakukan terobosan komprehensif untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pengambil kebijakan publik.

Perempuan adalah makhluk Tuhan seperti juga laki-laki. Sebagai hamba Tuhan ia juga memiliki tanggung jawab kemanusiaan, memakmurkan bumi dan mensejahterakan manusia. Perempuan untuk tugas itu tidak dibedakan dari laki-laki. Tuhan memberikan kepada mereka laki-laki dan perempuan potensi-potensi dan atau kemampuan untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tanggung jawab menunaikan amanah tersebut.

Agenda-agenda yang harus diperjuangkan untuk perbaikan kondisi masyarakat serta peningkatan posisi perempuan adalah masalah pendidikan, kesehatan dan penghentian kekerasan terhadap perempuan yang hingga saat ini belum mendapatkan perubahan berarti, karena itu partisipasi perempuan dalam pemilihan umum harus dilakukan lebih kritis untuk memilih pemimpin yang memiliki perspektif dan kepedulian terhadap rakyat dalam hal ini tentunya para kaum perempuan.

Jika para perempuan tidak memiliki strategi yang tepat, hampir pasti kepemimpinan perempuan dan partisipasi perempuan dalam politik pun akan pudar bahkan hilang begitu saja. Para calon-calon pemimpin perempuan yang diharapkan nantinya mampu membawa suara-suara kaum perempuan tentunya, selain strategi dan kemampuan memimpin, juga harus memiliki strategi-strategi yang mampu menyeimbangkan kaum laki-laki.

Bukan saja masalah kuota kursi perempuan yang selalu dituntut, tetapi harus mampu memberikan pembuktian kepada masyarakat dan dunia bahwa perempuan mampu menjadi seorang pemimpin yang adil, arif, bijaksana dan mampu membawa suara rakyat dari tingkatan mana saja tanpa membedakan Suku, Agama dan Ras tertentu.

I. Pengalaman partisipasi politik perempuan di beberapa negara lain :

Sebagai bahan pembelajaran ada baiknya jika kita mempelajari berbagai pengalaman yang telah dialami oleh perempuan-perempuan di beberapa negara, dalam memperjuangkan kemakmuran melalui partisipasi mereka dalam partai politik dan mempengaruhi kebijakan negaranya.

a. Perjuangan Perempuan di Afrika Selatan

Negara Afrika Selatan mempunyai lebih kurang 40 juta penduduk, di antaranya 80% adalah kulit hitam, 10% kulit putih dan 10% merupakan campuran dari berbagai etnis dan bangsa. Golongan kulit hitam yang dominan ternyata dijajah oleh kulit putih yang minoritas. Pada tahun 1912 pemimpin tradisional dan orang kulit hitam mengadakan kongres ANC. Anggota ANC terdiri dari tentara (sekitar 20.000 orang), aktifis (500.000 orang), pendukung sipil lainnya (sekitar 500.000 orang) dan di dalam partai ini lebih kurang 33% dari anggotanya adalah perempuan. Begitu gencarnya perjuangan ANC melawan politik apartheid sehingga pada tahun 1960, ANC ditutup yang memunculkan perjuangan bersenjata.

Pada tahun 1970 perjuangan rakyat AfSel didasarkan pada empat pilar yaitu, perjuangan bersenjata, propaganda internasional, pembangunan organisasi dan pergerakan bawah tanah. Keberhasilan perjuangan 4 pilar ini membawa pada pembukaan kembali ANC dan terbukanya jalur dialog. Terjadi peralihan metode perjuangan, dari bersenjata menjadi perjuangan politik, dan pada pemilu pertama tahun 1994 ANC meraih kemenangan

mutlak dengan perolehan suara 63%, sehingga memegang pemerintahan secara mutlak. Lalu pada tahun 2004 meraih 70% suara.

b. Perjuangan Perempuan di Filipina

Filipina pernah dijajah Spanyol. Sebanyak 80% penduduknya beragama Katolik. Pada tahun 1898 Filipina merdeka dan 10% muslim di Mindanao tidak pernah dijajah Spanyol. Sistem politik di Filipina diadopsi dari Amerika, karena Filipina pernah dijajah Amerika pada era 1950an. Ketika kemudian Filipina dipimpin diktator Marcos, banyak rakyat Filipina melakukan perjuangan untuk bebas dari kediktatorannya dengan cara politik. Partai-partai yang anti Marcos bergabung dan mendukung Corry untuk menggulingkan Marcos pada pemilu 1986. Salah satu partai yang anti Marcos adalah Akbayan, meskipun partai ini hanya meraih 2% suara. Namun kondisi perpolitikan terakhir, perempuan sudah jauh lebih maju. Bahkan secara kuantitas terdapat banyak sekali politisi perempuan di Filipina. Namun pelajaran berharga yang dapat diambil dari gerakan perempuan Filipina adalah bahwa, masing-masing gerakan tersebut tidak dapat menyatukan kepentingan bersama sehingga menjalankan agenda sendiri-sendiri. Hal ini tentu saja melemahkan pencapaian tujuan.

c. Partisipasi Perempuan Dalam Partai Nasional

Sebelum kita melihat peran perempuan dalam partai politik nasional, ada baiknya kita melihat sekilas perjuangan pemberdayaan perempuan mulai tahun 50an. Pada era tahun 50-60an, wacana gerakan pemberdayaan perempuan sangat terkait dengan polarisasi ideologi partai politik selama masa Demokrasi Liberal. Pada tahun 70-80an wacana gerakan perempuan, seperti juga yang dialami oleh kekuatan politik lainnya, sangat diwarnai arah perjuangan politik Orde Baru yang menekankan pada ideologi pembangunan yang disponsori negara secara penuh. Sedangkan pada era tahun 90-an, perjuangan pemberdayaan perempuan berkembang sangat pesat yang beraliran Feminisme. Para aktivis perempuan membangun pusat-pusat studi perempuan di universitas-universitas dan memperkenalkan teori Feminisme dari yang beraliran liberal hingga radikal di bawah jargon **Gender**. Baru pada era 2000an terjadi perubahan yang sangat mendasar di mana perjuangan pemberdayaan perempuan bergeser dari gerakan sosial ke arah gerakan politik. Dari perjuangan aktivis melalui demonstrasi-demonstrasi di jalanan ke parlemen. Koalisi dan aliansi gerakan perempuan berkembang di mana-mana dengan agenda **affirmative action** (tindakan khusus sementara). Dan gerakan perempuan menjadi bagian tidak terpisahkan dari gerakan reformasi dan demokrasi.

Perjuangan perempuan dalam partai politik nasional mengalami hambatan yang cukup berarti. Hal ini terjadi karena partai politik nasional pada saat itu (Orde Baru) memiliki karakteristik yang terlihat kurang demokratis, memang secara normatif tampilannya menganut prinsip demokratis, partisipasi dari bawah, kedaulatan ditangan anggota dan sebagainya. Dalam praktek ternyata didominasi tokoh-tokoh tertentu. Sistem patronase yang sangat dominan telah menghambat demokrasi dan memunculkan kelompok-kelompok yang cenderung negatif, parahnyalagi justru memunculkan konflik internal partai. Masalah-masalah dalam tubuh partai dipertontonkan kepada masyarakat dengan tanpa malu-malu. Pada rezim Orde Baru, hanya terdapat tiga partai politik, yang kenyataannya tidak mampu membawa perubahan yang diinginkan masyarakat. Menyatukan suara dan membuat kebijakan serta mengimplementasikan bila telah berada dalam pemerintahan, merupakan bagian dari tanggung jawab partai kepada masyarakat. Perempuan, dalam

partai-partai tersebut sangat sedikit dan kurang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Meskipun terdapat sejumlah perempuan yang menduduki posisi dalam dunia perpolitikan, misalnya dalam eksekutif dan legislatif, tapi hanya terkesan untuk *show off* menonjolkan bahwa terdapat perwakilan perempuan disana. Namun sayangnya representasi perempuan tersebut tidak diisi oleh orang-orang yang tepat dan menguasai masyarakat yang diwakilinya. Posisinya lebih banyak diisi oleh orang-orang dekat dari politisi laki-laki (istri, anak perempuan, dll).

Setelah masa orde baru, perjuangan perempuan dalam partai politik nasional mengusung agenda afirmative action yaitu adanya keterwakilan 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif. Meskipun kuota 30% perempuan telah dipenuhi oleh partai-partai politik, namun peletakan calon perempuan seringkali pada urutan terbawah, jadi perempuan masih dianggap sebagai pelengkap saja agar partai dapat lulus verifikasi.

II. Keterlibatan perempuan dalam politik

Pada Pasal 27 ayat 1 UUD 45 menyebutkan “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.” Namun demikian, para elit politik di tingkat nasional dan lokal cenderung menyepelkan rekomendasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Bahkan kebijakan khusus sementara (kuota 30% perempuan) dianggap sebagai diskriminasi terhadap laki-laki, buruknya lagi justru dianggap sebagai ajang perebutan lembaga politik dari tangan laki-laki.

Di sisi lain, banyak pihak yang percaya bahwa peningkatan jumlah perempuan dalam parlemen akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan bila belajar dari pengalaman di tempat-tempat lain (misalnya Swedia), di mana banyak perbaikan kondisi yang terjadi pada saat kwantitas perempuan meningkat dalam posisi pengambilan keputusan. Dengan demikian jika keterwakilan perempuan dalam lembaga politik rendah akan berakibat buruk pada perempuan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini diakibatkan karena produk hukum yang dihasilkan oleh mayoritas laki-laki kurang sensitif dalam memahami kebutuhan perempuan dan cenderung memunculkan diskriminasi terhadap kaum perempuan.

III. Sejarah kepemimpinan Perempuan di Aceh

Di kalangan masyarakat Aceh, kegemilangan peran publik perempuan pernah terukir dalam sejarah kerajaan Aceh dan sejarah perjuangan melawan penjajahan. Tidak ada daerah lain di Indonesia bahkan di dunia yang mencatat demikian banyak pemimpin dan pahlawan perempuan, yang berani, cerdas, kuat dan disegani oleh kawan maupun lawan seperti halnya di Aceh. Ketika Negara lain masih bergelut untuk memperjuangkan hak perempuan untuk terlibat dalam demokrasi melalui penggunaan hak pilih, Aceh justru telah memiliki pemimpin perempuan jauh sebelumnya. Kerajaan Aceh tidak hanya diperintah oleh sultan, sejumlah sultanah pun telah silih berganti memerintah negeri ini. Eksistensi perempuan ke ranah publik telah berlangsung sejak berabad yang lalu. Sultanah Malikhah Nurul Ilah berkuasa di Pasai dan Kedah (...- 1380M), Sultanah Nahrisyah, yang situs makamnya terletak di Gedong Aceh Utara (... - 1428M) memerintah di Samudera Pasai, Sultanah Safiatuddin Syah berkuasa (1641 - 1675), Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah berkuasa (1675 - 1678), Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah memerintah (1677 - 1688), dan Sultanah Kamalat Zainatuddin Syah (1688 - 1699), keempat sultanah yang disebutkan terakhir memerintah di Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa pemerintahan sultanah tersebut kerajaan Aceh mengalami beberapa kemajuan

yang berarti , seperti pelibatan perempuan dalam pemerintahan, hubungan internasional, perombakan undang-undang pemerintahan dan lain-lain.

IV. Konsep Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan merupakan sebuah seni, yaitu bagaimana mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dengan tanpa kekerasan agar dapat bersama mencapai suatu tujuan tertentu. Pemimpin dapat timbul melalui proses komunikasi atau adanya pengaruh antar pribadi. Sebaliknya kekuasaan adalah bagaimana mengendalikan dengan semua kekuatan termasuk memaksakan dengan kekerasan. Dan kaum perempuan memiliki semua modal di atas. Sebab perempuan jauh lebih tahu permasalahan yang sesungguhnya, baik di tingkat rumah tangga sampai di tingkat yang lebih luas lagi. Cara berpikir perempuan pun lebih komprehensif karena terbiasa memikirkan kompleksitas masalah, mulai dari anak, tetangga, permasalahan sosial, dll. Perempuan juga terbiasa melakukan sesuatu tanpa kekerasan.

V. Kepemimpinan Perempuan di Tingkat Gampong

Tingkat partisipasi perempuan di tingkat gampong di Aceh masih minim. Hal ini dapat dilihat dari berbagai musyawarah untuk pengambilan kebijakan yang seringkali mengabaikan keterlibatan perempuan. Meskipun dalam fungsi kontrol di gampong (tuha peuet) terdapat salah seorang dari unsur perempuan, namun hal itu bukan berarti sudah menjamin tersuarakannya aspirasi perempuan. Masih diperlukan suatu terobosan terutama tentang adanya pemahaman agama dan budaya yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu terlibat dalam politik. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan suatu proses penyadaran tentang hak-hak perempuan, termasuk dukungan pendapat dari ulama-ulama yang mendukung partisipasi perempuan.

Dapat diberikan pemahaman bahwa semua hal yang terjadi dalam perpolitikan akan membawa pengaruh bagi kehidupan keseharian perempuan, apalagi bila dihubungkan dengan pemahaman bahwa perempuan dianggap bertanggungjawab terhadap seluruh tugas domestik rumah tangga.

Adanya fakta bahwa masih banyak perempuan yang tidak tertarik untuk terlibat dalam politik praktis, baik oleh karena larangan maupun keinginan sendiri. Namun harus diberikan penyadaran bahwa hal ini bukan hambatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Karena meskipun seringkali tidak disadari namun keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu penyadaran tentang mekanisme yang dapat ditempuh, misalnya dalam penyusunan program penyusunan pembangunan desa yang biasa disebut musrembang (musyawarah rembuk). Dan juga bagaimana mengawal hasil rembuk desa tersebut dari tingkat desa-kecamatan-kabupaten-Propinsi. Sehingga hasil akhir yang didapatkan adalah lahirnya program pembangunan yang berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan target pembangunan seperti yang sering terjadi selama ini.

Evaluasi

Sessi IX

Judul	EVALUASI DAN PENUTUPAN
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tingkat kesesuaian materi dan metode berdasarkan kebutuhan peserta. 2. Mengetahui tingkat pemahaman materi oleh peserta berdasarkan tujuan pelatihan. 3. Mendapatkan umpan balik untuk kegiatan di masa depan. 4. Mengakhiri pelaksanaan pelatihan dengan kesan yang mendalam.
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta menyadari adanya perubahan dalam sikap dan pola pikir 2. Peserta mampu melakukan perubahan dalam aktifitas kesehariannya.
Pokok Bahasan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pelatihan ➤ Membuat rencana tindak lanjut setelah pelatihan selesai
Metode	Mengisi lembar evaluasi
Media pembelajaran	Lembar evaluasi
Langkah kerja dan pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengisi lembar evaluasi yang telah disiapkan ✓ Menutup pelaksanaan dengan kesan yang mendalam
Bahan dan peralatan	Lembar evaluasi
Waktu	🕒 45 menit efektif



Lembar pembelajaran

Evaluasi Efektifitas Pelatihan

Untuk mengetahui apakah sebuah pelatihan itu efektif atau tidak, ada 2 macam jenis evaluasi, yaitu:

1. Evaluasi terhadap proses pelatihan yang berlangsung.
Evaluasi ini meliputi penyelenggaraan pelatihan (teknis penyelenggaraan pelatihan), relevansi materi, metode yang digunakan dan pengajar (trainer dan fasilitator) dalam pelatihan tersebut.
2. Evaluasi terhadap hasil pelatihan.
Evaluasi ini mencakup evaluasi sejauh mana materi itu dapat dikuasai atau diserap oleh partisipan pelatihan, lebih jauh lagi apakah ada peningkatan kemampuan atau keterampilan, sikap dari para partisipan.

Sementara itu, evaluasi pelatihan sendiri meliputi 4 macam cara, yaitu:

1. Evaluasi reaksi
Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur bagaimana reaksi atau kepuasan para partisipan terhadap kualitas program yang diadakan. Reaksi tersebut ditinjau dari aspek penyelenggaraan yang mencakup pengorganisasian acara, akomodasi, administrasi, konsumsi, penataan waktu, perlengkapan materi sampai proses penyampaian materi.
2. Evaluasi pembelajaran
Dipakai untuk mengukur perkembangan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta latihan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan isi materi dan tujuan pelatihan dengan penyerapan partisipan dalam segi pengetahuan, sikap dan keterampilan.
3. Evaluasi implementasi
Dilakukan dengan menilik perubahan perilaku atau implementasi materi didunia kerja sehari-hari. Evaluasi ini sulit dilakukan karena mungkin partisipan tidak mengaplikasikan apa yang diperoleh selama pelatihan.
4. Evaluasi hasil organisasi
Dilakukan untuk memilih bagaimana pengaruh perkembangan sikap dan perilaku sebagai hasil pendidikan dan pelatihan terhadap lembaga.

Hal-hal pokok yang perlu dipertimbangkan untuk melaksanakan evaluasi pendidikan politik adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi berorientasi kepada pengukuran perubahan perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran/pelatihan.
2. Sebaiknya evaluasi dilakukan oleh peserta itu sendiri (self evaluation)
3. Perubahan positif perilaku merupakan tolak ukur keberhasilan
4. Materi evaluasi berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelatihan.
5. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan yang mencakup kekuatan dan kelemahan.
6. Menilai efektifitas materi yang dibahas dalam hubungannya dengan perubahan sikap dan pola pikir.

Instrument lain yang dapat dipergunakan dalam proses evaluasi pelatihan adalah:

1. Mood Meter

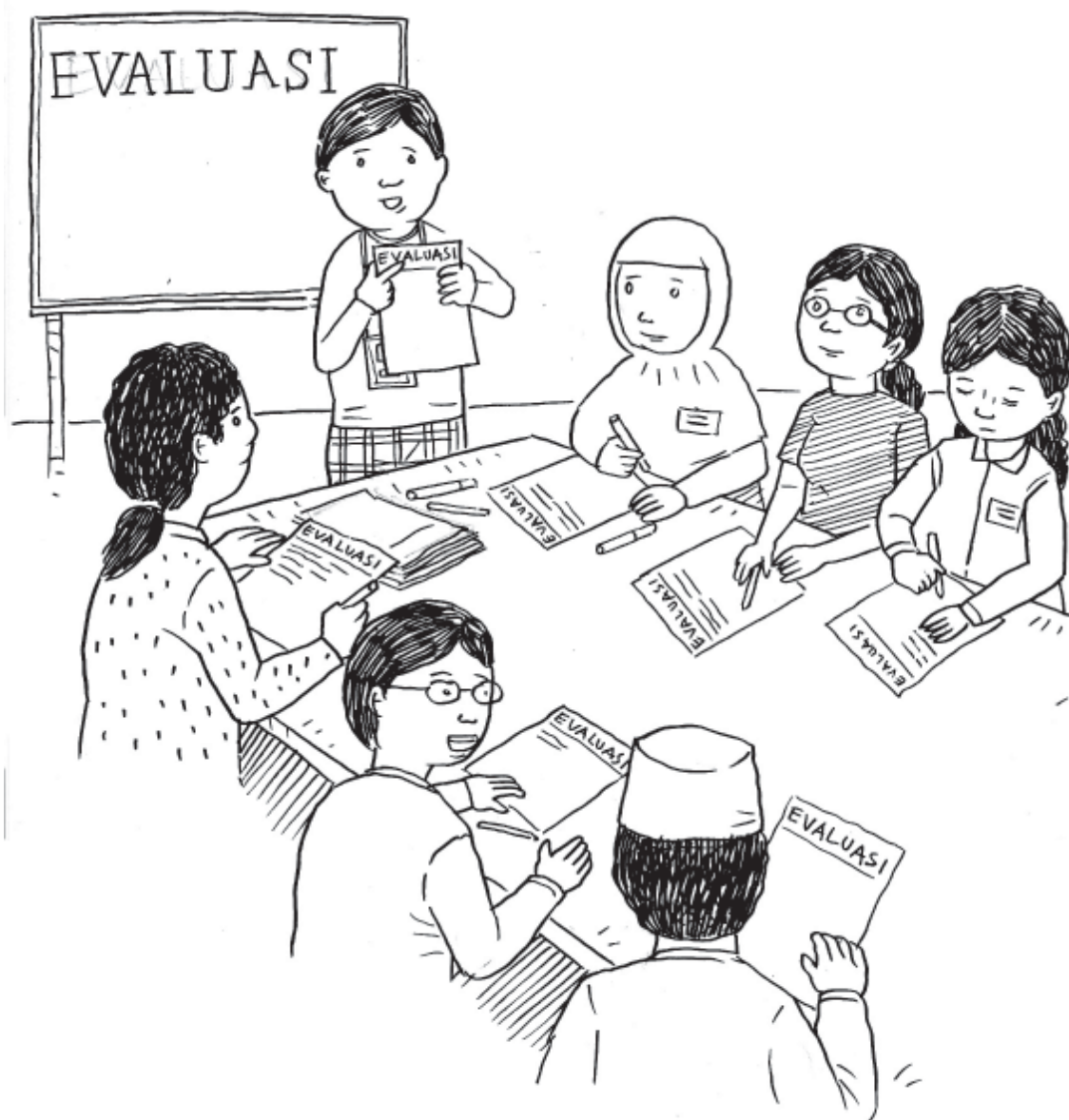
Digunakan untuk mengetahui tingkat perasaan dan suasana hati peserta selama mengikuti pelatihan. Mood Meter ini dilakukan secara terbuka dan biasanya ditempelkan ditempat yang bisa dibaca oleh seluruh peserta pelatihan dengan skala yang digunakan antara lain "senang", "cukup senang", "tidak senang".

2. Evaluasi harian

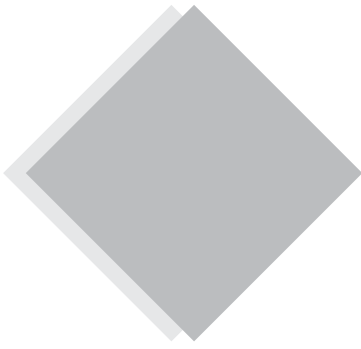
Evaluasi ini dilakukan setiap hari pada akhir pelatihan. Evaluasi ini pada umumnya menilai proses dan korelasi yang terjadi selama satu hari, yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ditemukan pada hari itu, disamping juga menilai hal-hal yang menyangkut substansi pokok bahasan.

3. Evaluasi akhir

Dilakukan pada akhir pelatihan, yang menyangkut efektifitas seluruh aspek pelatihan, mulai dari penyelenggaraan, metodologi, partisipasi peserta, fasilitator, materi pelatihan, suasana pelatihan, dan lain sebagainya. Evaluasi pelatihan ini dilakukan oleh peserta sendiri dan bersifat terbuka.



Lampiran-Lampiran

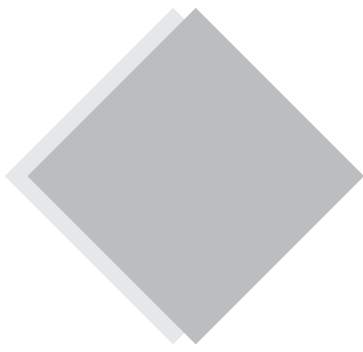


Lampiran 1

Contoh lembar evaluasi menggunakan instrument pelatihan.

5 sangat baik 4 baik 3 cukup 2 kurang 1 sangat kurang

		1	2	3	4	5
1.	Pentingnya pelatihan bagi diri saya					
2.	Manfaat, topic dan isi pelatihan					
	a. MoU Helsinki terhadap pemerintahan Aceh					
	b. Kearifan local tentang politik					
	c. Demokrasi, HAM dan Partai Politik					
	d. Gerakan social					
	e. Kesadaran kritis bagi pelaku gerakan social					
3.	Efektifitas metode yang digunakan					
	a. Ceramah (penyampaian dari pemandu)					
	b. Diskusi					
	c. Simulasi					
	d. Presentasi kelompok					
4.	Efektifitas penggunaan alat bantu					
5.	Manfaat alat bantu lainnya (display, contoh media dan lain-lain)					
6.	Manfaat bahan-bahan pegangan (handout)					
7.	Kemampuan pemandu dalam menjelaskan topic					
	Kemampuan pemandu dalam menguraikan					
8.	bahasan dan menjawab pertanyaan (penggunaan bahasa dan istilah)					
9.	Kemampuan pemandu memancing partisipasi					
10.	Fasilitas : tempat pelatihan					
11.	Penunjang acara : konsumsi dan lain sebagainya					



Lampiran 2

Contoh lembar evaluasi umum.

JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT DAN BERIKAN PENJELASAN

1. Pengetahuan baru yang anda peroleh dari pelatihan ini adalah:

1. Pengaruh MoU terhadap pemerintahan Aceh
2. Kearifan lokal tentang politik
3. Demokrasi, HAM dan Partai politik
4. Gerakan sosial
5. Budaya kesadaran kritis bagi pelaku gerakan sosial
6. Kepemimpinan perempuan dan partisipasi politik

2. Keterampilan apakah yang ingin anda pelajari lebih lanjut pada pelatihan berikutnya?

1. Pengaruh MoU terhadap pemerintahan Aceh
2. Kearifan lokal tentang politik
3. Demokrasi, HAM dan Partai politik
4. Gerakan sosial
5. Budaya kesadaran kritis bagi pelaku gerakan sosial
6. Kepemimpinan perempuan dan partisipasi politik

7. Se jauh mana harapan anda terpenuhi? Pilihlah satu jawaban dan jelaskan

5 semua 4 hampir semua 3 cukup 2 tidak cukup 1 kurang

Penjelasan singkat:

.....
.....

8. Menurut anda, se jauh mana partisipasi anda dalam pelatihan ini? Pilih satu jawaban dan jelaskan

5 semua 4 hampir semua 3 cukup 2 tidak cukup 1 kurang

Penjelasan singkat:

.....
.....

9. Hal apa yang paling anda sukai dalam pelatihan ini? Jelaskan hal yang pokok saja.

.....
.....

10. Hal apa yang paling tidak anda sukai dalam pelatihan ini? Jelaskan hal yang pokok saja

.....
.....

11. Apa saran anda untuk meningkatkan pelatihan serupa di waktu mendatang?

1. Materi pelatihan	
2. Metode	
3. fasilitator	
4. Fasilitas/alat bantu	

5. Waktu (kapan/berapa lama)	
6. Partisipan (siapa)	

Komentar lain:

.....
.....

Referensi Bacaan

Bahan bacaan berikut dapat dipakai untuk memperdalam tema-tema penting di dalam pelatihan ini.

Gender dan Gerakan Perempuan

1. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Insist Press, 2008.
2. Puthut EA, *Jejak Air: Biografi Politik Nani Zulminarni*, Insist Press, 2007.
3. Butet Manurung, *Sokola Rimba: Pengalaman Belajar Bersama Orang Rimba*, Insist Press, 2007.

Demokrasi dan HAM

1. Colin Hines, *Mengganti Globalisasi Ekonomi menjadi Lokalisasi Demokrasi*, Insist Press, 2005.
2. Ha Joon Chang dan Ilene Grabel, *Membongkar Mitos Neolib: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan*, Insist Press, 2008.

Kesadaran Kritis

1. Roem Topatimsang dkk, *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*, Insist Press, 2005.
2. Roem Topatimsang, *Sekolah Itu Candu*, Insist Press, 2007.

Gerakan Sosial

1. Noer Fauzi, *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Insist Press, 2005.
2. Jo Hann Tan dan Roem Topatimsang, *Mengorganisir Rakyat*, Insist Press, 2004.
3. Roem Topatimsang dkk, *Mengubah Kebijakan Publik*, Insist Press, 2005.
4. Roem Topatimsang dkk, *Orang-orang Kalah*, Insist Press, 2004.

Kearifan Lokal

1. Pieter Elmaz dkk, *Ken Sa Faak: Benih-benih Perdamaian dari Kepulauan Kei*, Insist Press, 2004.
2. Kartika Rini, *Tempun Petak Nana Sare: Kisah Dayak Kudori*, Insist Press, 2006.
3. Ambarwati Kurnianingsih, *Simulacra Bali: Ambiguitas Tradisionalisasi Orang Bali*, Insist Press, 2008.
4. Hira Jhamtani, *Lumbung Pangan: Menata Ulang Kebijakan Pangan*, Insist Press, 2008.
5. Effendi Syarief, *Melawan Ketergantungan pada Minyak Bumi*, Insist Press, 2004.
6. Ton Dietz, *Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam*, Insist Press, 2005.